

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Deskripsi Data Penelitian**

Pada pembahasan ini akan dijelaskan secara rinci hasil penelitian dari kedua media cetak yaitu Harian Kompas dan Koran Sindo mengenai objektivitas pemberitaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 19 September - 23 Oktober 2016 sebelum dilaksanakannya masa kampanye oleh ketiga pasangan calon. Selain itu, temuan hasil dari penelitian kedua media cetak mengenai objektivitas pemberitaan kedua media cetak menjadi sub bahasan yang meliputi kategori *factualness*, *completeness*, panjang berita, relevansi, tipe liputan, arah berita. Pemberitaan mengenai Pilkada DKI Jakarta 2016 menjadi daya tarik media massa untuk meliput kegiatan calon kandidat dalam mempromosikan diri untuk menarik hati masyarakat memilih kandidat tersebut.

Pembahasan mengenai objektivitas pemberitaan ini dilakukan melalui hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan oleh pengkoder untuk mengetahui persentase persetujuan dalam hasil penelitian. Proses uji reliabilitas yang dilakukan secara keseluruhan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara spesifik mengenai objektivitas kedua media yakni Harian Kompas dan Koran Sindo dalam memberitakan Pilgub DKI 2016 periode 19 September – 23 Oktober 2016.

Uji reliabilitas yang dilakukan oleh kedua pengkoder, yaitu dengan menggunakan rumus Holsti yang menyatakan bahwa, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil

perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika di bawah angka 0,7, berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011:290).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemetaan pada objek penelitian, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I dengan tujuan untuk melihat objektivitas pemberitaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2016 pada Surat Kabar Kompas dan Koran Sindo periode September-Oktober 2016. Pemetaan tersebut dilakukan dengan memilih media yang akan menjadi objek penelitian dengan melihat penggambaran pesan selama jangka waktu tertentu, yaitu bulan September-Oktober 2016.

Pada defenisi operasional yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan uji reliabilitas terhadap objektivitas pemberitaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2016 pada Surat Kabar Kompas dan Koran Sindo, uji reliabilitas tersebut akan dilakukan dalam 6 jenis, yaitu:

1. Tes uji reliabilitas frekuensi *factualness*
2. Tes uji reliabilitas frekuensi *completeness*
3. Tes uji reliabilitas frekuensi panjang paragraf
4. Tes uji reliabilitas frekuensi mencakup nilai berita
5. Tes uji reliabilitas frekuensi tipe liputan
6. Tes uji reliabilitas frekuensi arah berita

Penelitian ini menggunakan seluruh total sampling yang akan dianalisis yaitu berjumlah 66 berita dari kedua media cetak yaitu Harian Kompas dan Koran Sindo dengan jumlah Kompas yaitu 30 berita dan Sindo 36 berita terhitung sejak 19 September-23 Oktober 2016.

No.	Tanggal	Judul Berita	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
			Agus - Sylviana	Ahok - Djarot	Anies - Sandiaga	Ketiga Pasangan Calon
1.	19-9-2016	Ujian Kematangan Demokrasi		✓		
2.	20-9-2016	PDIP-P Putuskan Pasangan Hari Ini		✓	✓	
3.	21-9-2016	Pertarungan Ide Menentukan				✓
4.	22-9-2016	Koalisi Bahas Dua Kemungkinan				✓
5.	23-9-2016	Polisi Pantau Media Sosial		✓	✓	
6.	23-9-2016	Empat Parpol Jagokan Agus Yudhoyono	✓			
7.	24-9-2016	Pilkada DKI Gambaran Pilpres				✓
8.	25-9-2016	Jaga Kedamaian Pilkada 2017				✓
9.	26-9-2016	Panglima Tegaskan Sikap Netral TNI				✓
10.	26-9-2016	Jakarta dan Tiga Poros Kekuasaan				✓
11.	26-9-2016	BNN Telusuri Jejak Narkoba				✓
12.	27-9-2016	Demi Meraih Kemenangan				✓
13.	28-9-2016	Mencari Sosok Bang Ali				✓
14.	1-10-2016	Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan				✓
15.	1-10-2016	Kemang Segera Dibongkar		✓		
16.	3-10-2016	Modal Kampanye Andalkan Partisipasi	✓	✓		
17.	5-10-2016	Survei LSI: Elektabilitas Petahana Menurun				✓
18.	6-10-2016	Menanti "Penjaga Nalar" Politik				✓
19.	6-10-2016	KPU DKI Periksa Kelengkapan Berkas Tiga Pasang Kandidat				✓
20.	7-10-2016	Transfer Bagi Hasil Ubah Struktur Anggaran		✓		
21.	7-10-2016	Tim Para Calon Mulai Berstrategi				✓
22.	8-10-2016	Ancaman Pidana Bagi Kampanye SARA		✓	✓	
23.	10-10-2016	Makin Gencar Menyapa	✓		✓	
24.	11-10-2016	Restu Dahulu, Konsolidasi Kemudian		✓		

25.	11-10-2016	Basuki Didesak Berhati-hati		✓		
26.	13-10-2016	Relawan Pendukung Minta Basuki Perbaiki Komunikasi				✓
27.	15-10-2016	Ribuan Saksi Dikerahkan di Pilkada		✓	✓	
28.	15-10-2016	Bareskrim Berjanji Usut Tuntas Pidato Basuki		✓		
29.	18-10-2016	Surat Keterangan E-KTP Diusahakan Bisa Dipakai	✓	✓		
30.	22-10-2016	Pembatalan Calon Mungkin Terjadi				✓
<b>TOTAL:</b>			<b>4</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>16</b>

**Tabel 3.1**  
**Total Berita Harian Kompas**

Pemberitaan mengenai Pilgub DKI Jakarta menempati posisi pertama yang paling banyak diberitakan, yang artinya ketiga pasangan calon yang akan menjadi Cagub dan Cawagub menjadi pemberitaan yang fokus pada Pilgub DKI Jakarta yang diberitakan oleh Kompas. Pemberitaan mengenai Pilgub DKI dari ketiga pasangan calon yang diberitakan oleh Kompas, menunjukkan bahwa berdasarkan kesemua pasangan calon, Kompas mengangkat ketiga pasangan sebagai informasi yang akan disajikan Kompas kepada masyarakat mengenai Pilkada DKI Jakarta.

Dari tabel di atas mengenai pemberitaan Pilgub DKI Jakarta 2016 di Harian Kompas, dapat dilihat dari ketiga pasangan calon yang menjadi Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, Ahok dan Djarot menduduki peringkat pertama yang paling banyak diberitakan oleh Kompas. Pemberitaan mengenai Ahok dan juga Djarot yaitu terkait dengan kegiatan sehari-hari yang telah dilakukan oleh Ahok dan Djarot untuk memperkenalkan diri kembali dan juga turun ke daerah-daerah yang ada di Jakarta untuk menemui masyarakat langsung melakukan sosialisasi, partai-partai pendukung pasangan calon, dan berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, terutama untuk program-program yang akan dijalankan oleh

Ahok-Djarot apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode selanjutnya. Selain itu, pasangan lain juga diberitakan mengenai program-program yang akan dijalankan, dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menyapa masyarakat agar mengetahui keluhan dan harapan dari masyarakat kepada pasangan calon lainnya untuk kota Jakarta kedepannya. Berita mengenai Anies-Sandiaga merupakan berita terbanyak kedua setelah Ahok-Djarot yang diberitakan oleh Kompas, selanjutnya pemberitaan mengenai cagub dan cawagub yang paling sedikit diberitakan oleh Kompas ialah Agus-Sylviana yaitu terdapat 4 berita dari total berita pada Kompas yaitu 30 berita yang khusus membahas Agus-Sylviana pada Harian Kompas periode 19 September-23 Oktober 2016.

No.	Tanggal	Judul Berita	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
			Agus – Sylviana	Ahok - Djarot	Anies - Sandiaga	Ketiga Pasangan Calon
1.	19-9-2016	Penolakan Ahok Makin Meluas		✓		
2.	20-9-2016	Koalisi Siapkan Skenario Hadapi Cagub PDIP				✓
3.	21-9-2016	PDI-P Jagokan Ahok-Djarot, Koalisi Solid Usung Satu Calon		✓	✓	
4.	22-9-2016	SBY Konsolidasi dengan PKB, PAN, dan PPP				✓
5.	22-9-2016	Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik		✓		
6.	23-9-2016	Koalisi Gagal Satukan Barisan				✓
7.	24-9-2016	Tiga Pasang Kandidat Sama Kuat				✓
8.	25-9-2016	KPU Hanya Andalkan Tes Urine				✓
9.	25-9-2016	Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi				✓
10.	26-9-2016	Pilkada DKI Berpotensi Dua Putaran				✓
11.	27-9-2016	Hindari Saling Hujat di Pilkada				✓
12.	28-9-2016	Parpol Pendukung Ahok-Djarot Berebut Ketua Tim				✓

		Kemenangan				
13.	30-9-2016	DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin				✓
14.	1-10-2016	Tiga Pasangan Calon Siap Adu Strategi				✓
15.	3-10-2016	Calon Gubernur DKI Mulai Bergerilya				✓
16.	4-10-2016	Dikritik Anies Soal Sungai, Ahok Emosi		✓	✓	
17.	5-10-2016	Elektabilitas Ahok-Djarot Terus Merosot				✓
18.	6-10-2016	Tim Kandidat Beradu Strategi Pemenangan				✓
19.	7-10-2016	Cagus-Cawagub DKI Perkuat Basis Massa				✓
20.	8-10-2016	Cagub Prioritaskan Penanganan Transportasi				✓
21.	9-10-2016	HT:DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman	✓		✓	
22.	10-10-2016	Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017				✓
23.	10-10-2016	Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu SARA				✓
24.	11-10-2016	Aparat Harus Jaga Netralitas		✓		
25.	12-10-2016	Penutupan Diskotek Mille's Sudah Tepat		✓		
26.	12-10-2016	DPR Desak Kapolri Klarifikasi dan Minta Maaf		✓		
27.	14-10-2016	Sembilan Diskotek Terancam Ditutup		✓		
28.	14-10-2016	Sikap MUI Tak Bertendensi Politik		✓		
29.	15-10-2016	Calon Gencar Sosialisasi ke Warga				✓
30.	15-10-2016	Lautan Massa Protes Ahok		✓		
31.	17-10-2016	Cagub-Cawagub Adu Program untuk Rakyat				✓
32.	18-10-2016	Ratusan Gedung di Kawasan Jakarta Tidak Aman		✓		
33.	19-10-2016	Pertarungan Artis di Pilkada DKI Jakarta				✓
34.	19-10-2016	Terima Komputer, Netralitas KPU Bisa Terganggu				✓

35.	21-10-2016	Bareskrim Polri Periksa Staf Ahok		✓		
36.	21-10-2016	Anies-Sandiaga Berani Kontrak Politik				✓
<b>TOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

**Tabel 3.2**  
**Total Berita Koran Sindo**

Tabel di atas menunjukkan jumlah berita yang terdapat pada Koran Sindo periode 19 September-23 Oktober 2016. Terdapat 36 jumlah berita pada Koran Sindo yang memberitakan tentang Pilgub DKI Jakarta 2016. Dari pemberitaan mengenai Pilgub DKI Jakarta, sebanyak 23 berita (jumlah berita terbanyak) yang membahas ketiga pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta. Koran Sindo dan juga Harian Kompas memberitakan jumlah yang terbanyak, terdapat pada pemberitaan mengenai ketiga pasangan calon. Berita tersebut berupa profil, kegiatan, dan juga informasi yang disajikan mengenai ketiga pasangan calon. Urutan kedua yang memiliki jumlah berita kedua terbanyak setelah berita ketiga pasangan calon ialah pemberitaan mengenai Ahok-Djarot. Koran Sindo memberitakan Ahok-Djarot yang paling banyak mengenai kasus dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh Ahok.

Koran Sindo juga memiliki posisi yang sama dengan Harian Kompas berupa berita kedua terbanyak yang diberitakan mengenai salah satu pasangan calon ialah Ahok-Djarot. Pemberitaan mengenai Ahok-Djarot lebih unggul jika dibandingkan dengan kedua pasangan calon, karena Ahok pada saat tersebut menuai banyak pemberitaan negatif, terutama pada kasus penistaan agama yang telah dilakukannya, sehingga membuat masyarakat melakukan aksi demo beberapa waktu lalu. Berita khusus yang membahas Anies-Sandiaga tidak banyak, hanya terdapat 2 berita pada periode 19 September-23 Oktober 2016 dari jumlah berita

yaitu 36 berita, dan 1 berita yang juga hanya membahas tentang Agus-Sylviana. Dari kedua media tersebut, maka Harian Kompas dan Koran Sindo lebih banyak mengangkat isu mengenai Pilgub DKI Jakarta beserta Cagub dan Cawagubnya yang menyajikan informasi dari ketiga pasangan calon, sehingga memiliki informasi yang bukan khusus memberitakan 1 pasangan calon, tetapi juga mengangkat ketiga pasangan calon dan pemberitaan mengenai ketiganya.

## **2. Hasil Analisis Berdasarkan *Factualness***

*Factualness* merupakan bagian dari unsur-unsur objektivitas yang merupakan dimensi dari faktualitas. Faktualitas merupakan bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan disajikan tanpa komentar atau bebas dari komentar apapun. Kebenaran (*truth*) terbagi menjadi 3 bagian, yang salah satunya ialah *factualness*. *Factualness* sendiri ialah pemisahan antara fakta dengan opini, yang dibagi menjadi empat bagian dalam penelitian ini yaitu fakta sosiologis, fakta psikologis, fakta kombinasi dan tidak ada kedua fakta sosiologis maupun psikologis.

Fakta sosiologis ialah pemberitaan yang bahan bakunya berupa kejadian/peristiwa nyata/faktual (berdasarkan kondisi langsung di lapangan), sedangkan fakta psikologis ialah berita yang berupa interpretasi subjektif (pernyataan/opini) dalam membentuk pernyataan, penilaian, dan pendapat sumber berita yang dicampurkan oleh jurnalis itu sendiri. Selain kedua fakta tersebut, penelitian ini juga memasukkan fakta kombinasi yang merupakan gabungan dari kedua fakta yang memungkinkan terdapat pada pemberitaan di kedua media. Bagian lain yang juga menjadi tambahan dalam penilaian di

*factualness* ialah tidak ada keduanya (tidak terdapat fakta sosiologis maupun psikologis) dalam berita.

*Factualness* menjadi salah satu bagian dari objektivitas berita yang menyajikan fakta di lapangan dengan melihat adanya unsur pernyataan atau opini dalam bentuk pernyataan, penilaian dan pendapat sumber berita yang terdapat dalam berita. Fakta-fakta tersebut menjadi salah satu unit fisik dalam artikel berita yang diteliti, sehingga penyajian berita dapat menampilkan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Hasil analisis pada kategori ini akan menjelaskan bagaimana hasil *coding* pada kategori *factualness* pada pemberitaan Pilgub DKI 2016 di Harian Kompas dan Koran Sindo periode 19 September-23 Oktober 2016.

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Fakta Sosiologis	19	19	63,33%	22	22	61,11%
Fakta Psikologis	5	5	16,67%	8	8	22,22%
Fakta Kombinasi	6	6	20%	6	6	16,67%
Tidak Ada Keduanya	-	-	-	-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>	30	30	100 %	<b>Total Keseluruhan</b>	36	100 %

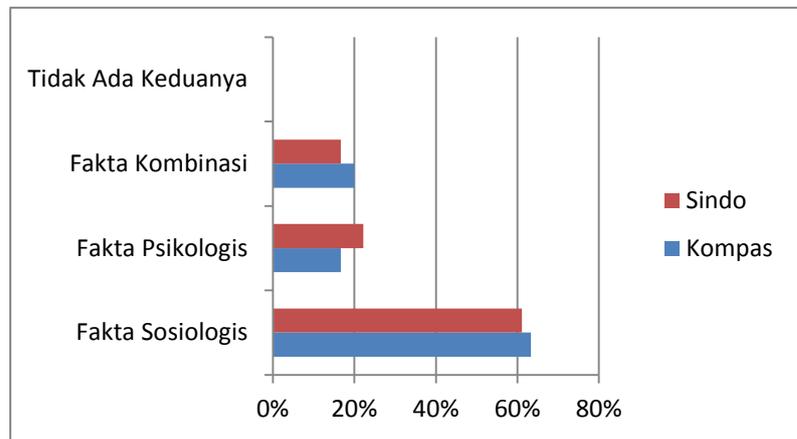
**Tabel 3.3 Hasil Analisis *Factualness*  
Sumber: Data Coding 2016**

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Harian Kompas lebih banyak menampilkan fakta sosiologis dibandingkan dengan fakta psikologis, kombinasi maupun tidak ada keduanya. Fakta sosiologis yang terdapat pada Harian Kompas dalam memberitakan Pilgub DKI 2016 sejumlah 63,33% dibandingkan dengan fakta psikologis yang berjumlah 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaannya Harian Kompas lebih

mementingkan berita yang didapat melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang akan diberitakan. Fakta kedua terbanyak setelah fakta sosiologis di Harian Kompas ialah fakta kombinasi berjumlah 20% dan dilanjutkan dengan fakta psikologis sejumlah 16,67%.

Jumlah persentase terbanyak dari hasil penelitian Koran Sindo terhadap pemberitaan Pilgub DKI Jakarta 2016 ialah pada fakta sosiologis, kedua media (Kompas dan Sindo) menunjukkan fakta sosiologis lebih banyak terdapat pada pemberitaan mengenai Pilgub DKI 2016 jika dibandingkan dengan fakta psikologis, kombinasi dan tidak ada keduanya. Namun, jumlah persentase Harian Kompas memiliki jumlah persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan Koran Sindo. Harian Kompas sebesar 63,33% dan Koran Sindo sebesar 61,11%. Hasil pada kedua media melalui *coding* menunjukkan bahwa kedua media cetak lebih mementingkan wawancara langsung dan menulis berita berdasarkan kondisi di lapangan, meskipun masih terdapat fakta psikologis maupun kombinasi dalam pemberitaan Pilgub DKI 2016.

Wartawan akan sulit untuk menampilkan keseluruhan kondisi di lapangan, karena masih terdapatnya unsur subjektifitas wartawan yang ditampilkan dalam berita. Hal ini juga terdapat pada aturan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pasal 3 yang salah satunya menyebutkan bahwa wartawan dalam menyusun dan menulis berita harus memegang teguh prinsip objektivitas dengan tidak mencampurkan unsur opini dan fakta.



**Tabel 3.4**  
**Ilustrasi Persentase *Factualness***

Berdasarkan hasil analisis, diketahui *factualness* kecenderungan berita Pilgub DKI 2016 terdapat pada Harian Kompas dengan persentase sebesar 63,33% pada fakta sosiologis dengan jumlah 19 berita dari total berita pada Harian Kompas sejumlah 30 berita. Sedangkan pada Koran Sindo, persentase sebesar 61,11% diperoleh dengan fakta sosiologis tertinggi dengan jumlah 22 berita dari total berita sejumlah 36 berita. Hasil ini menunjukkan tidak terlalu tingginya persentase yang ditunjukkan karena masih terbagi dan terdapatnya unsur fakta psikologis yang artinya masih terdapat pernyataan, penilaian, dan pendapat sumber berita pada wawancara yang masih memunculkan subjektifitas wawancara.

Selain itu, dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa kedua media cetak (Harian Kompas dan Koran Sindo) memisahkan antara fakta dan opini, hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase yang didapat lebih besar pada fakta sosiologis oleh kedua media, sehingga dari fakta sosiologis menunjukkan bahwa kedua media cenderung memisahkan unsur opini dan fakta.

Contoh berita yang terdapat fakta sosiologis adalah berita yang berjudul “Bareskrim Polri Periksa Staf Ahok”, pada tanggal 21 Oktober 2016 di Koran Sindo, dengan fakta sosiologisnya ialah “Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri memeriksa satu orang staf Gubernur DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin. Pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu". Berita tersebut merupakan peristiwa yang nyata di lapangan tanpa adanya unsur pernyataan subjektif dari wartawan pada kata-kata yang terdapat dalam berita.

## Bareskrim Polri Periksa Staf Ahok

**JAKARTA**—Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri memeriksa satu orang staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin.

Pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

Direktur Tipidam Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, satu orang staf Ahok telah diperiksa oleh penyidik terkait pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama. "Sudah satu. Alhamdulillah kita sudah periksa. Sudah kita klarifikasi. Masalah penistaan agama, dia tidak berani komentar. Artinya memang ada kejadian seperti itu. Ada di sana, kurang lebih bahasanya seperti itu, cuma masalah menista atau enggak, dia enggak ngeri," ungkapnyakemarin.

Agus mengatakan, akan melakukan koordinasi untuk mengambil hasil analisis Laboratorium Forensik (Labfor) Polri terhadap video dan pernyataan Ahok. "Hari ini saya akan koordinasi dengan Kalabfor, mudah-mudahan minggu ini Labfor sudah selesaikan analisisnya. Minggu depan kita bisa melaksanakan klarifikasi dengan ahli bahasa, ahli agama, dan ahli pidana," katanya.

Penyidikan kasus dugaan penghinaan agama oleh Ahok akan terus dilanjutkan oleh Bareskrim Mabes Polri meski yang bersangkutan mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. "Ya, wong kalau ini ber-

jalan juga tidak menghambat beliau. Misalnya sampai putusan ada banding, ada kasasi, tunggu *inkracht*-nya panjang. Jadi tidak akan menghambat beliau, proses *inkracht*-nya kan panjang," ucap Agus.

Terkait rencana pemanggilan Ahok, Agus mengaku, masih menunggu perintah Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukamanto. "Kalau pada waktunya, apayang disampaikan Pak Kaba akan kita laksanakan. Proses izinnya akan kita buat. Kita siapkan saja. Karena Pak Kabareskrim sudah menyampaikan itu (pemanggilan Ahok), artinya pada saatnya juga akan kita laksanakan itu," ungkap Agus.

Hingga saat ini Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa delapan saksi terkait kasus tersebut. "Sudah delapan orang yang diperiksa. Mereka orang-orang yang berada di lokasi saat kejadian saat Ahok berpidato. Seperti pihak dinas, lurah, dan masyarakat sekitar. Juga ada satu orang staf Ahok. Akan dianalisis dan membandingkan keterangan-keterangan saksi untuk memberikan gambaran situasinya seperti apa, keadaan yang sebenarnya, ceritanya gimana, kita bandingkan hasil video yang kita ambil dari dinas. Kita putar," ungkap Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukamanto.

Ari mengatakan, saat ini video tersebut masih diperiksa

oleh Laboratorium Forensik untuk diambil secara teknis guna dipelajari.

"Dibuka nanti dan dipelajari, dan dibuka kembali dengan saksi yang melihat apakah ada yang berkesesuaian. Penyidik akan memperlihatkan video tersebut kepada ahli tafsir, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum pidana untuk melihat ada tidaknya perbuatan pidana. Minggu ini pasti ada langkah lanjutan pemeriksaan saksi lain," kata Ari.

**"Sudah delapan orang yang diperiksa. Mereka orang-orang yang berada di lokasi saat kejadian saat Ahok berpidato."**

**KOMJEN POL ARI DONO SUKAMANTO**  
Kabareskrim

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengapresiasi sikap profesionalisme pihak kepolisian yang mengungkap kasus penistaan agama oleh Ahok dengan memeriksa stafnya. Dia yakin polisi tidak akan membiarkan kasus ini terhenti meski jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak ada hubungannya dengan politik. Penistaan itu keluar dari perkataan Ahok sendiri, bukan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami percaya polisi profesional. Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Orang Ahok sendiri yang ngomong," katanya kemarin.

Sementara itu, Gubernur Ahok tidak mau ber komentar terkait pemeriksaan terhadap salah satu stafnya oleh Bareskrim dalam kasus penistaan agama. "Saya enggak tahu," ujarnya.

Pakar hukum pidana Faisal Santiago meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk profesional dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. "Saya meminta Polri netral dan profesional dalam menangani kasus Ahok agar Polri tidak dituduh sebagai alat politik oleh pihak tertentu," kata Faisal.

Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus mengacu pada Surat Edaran Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor SE/7/VI/2014 yang dikeluarkan era kepemimpinan Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti. Dalam aturan tersebut, ketika sudah memasuki tahapan pemilu, apalagi masa pendaf-taran, semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur ditangani selesaipilka.

Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTH) Laksono Utomo mengatakan, masyarakat harus menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menangani kasus Ahok. "Mari kita percayakan kepada Polri penanganan proses hukumnya," katanya.

**● binti mufarida/  
bima setiyadi**

**Gambar 3.1**  
**Contoh Berita Fakta Sosiologis di Koran Sindo**

**JAKARTA** – Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan melulu cerita tentang pertarungan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, beserta pasangan masing-masing. Pertarungan juga melibatkan tim kampanye mereka, termasuk di dalamnya sejumlah artis cantik yang menempati posisi penting dalam tim.

Sejauh ini muncul beberapa nama yang melekat pada masing-masing kandidat. Di tim Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, muncul nama Sophia Latjuba. Dia bahkan sudah didapat menjabat posisi yang sangat

strategis, yakni sebagai juru bicara. Belakangan dia terlihat intens mendampingi Ahok turun kelapangan.

Apalagi Annisa Pohan. Artis dan presenter ini hampir selalu mewarnai kemunculan Agus Yudhoyono yang tak lain suaminya sendiri. Dia memperlihatkan semangatnya mendampingi sang suami, terutama pada momen bertatap muka dengan publik. Sementara dipihak Anies Baswedan-Sandiaga Uno, muncul Olla Ramli sebagai rekan yang mendukung kemenangan pasangan tersebut.

Keberadaan artis-artis cantik ter-

**Gambar 3.2**  
**Contoh Berita Fakta Psikologis di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No.33)**

Kedua berita yang terdapat pada Koran Sindo di atas, merupakan contoh dari fakta sosiologis dan fakta psikologis. Contoh fakta psikologis pada berita di Koran Sindo tanggal 19 Oktober 2016 di atas, dengan judul “Pertarungan Artis di Pilkada DKI Jakarta”. Berita yang menyebutkan Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan melulu cerita tentang pertarungan Ahok, Agus dan Anies, beserta pasangan masing-masing. Pertarungan juga melibatkan tim kampanye mereka, termasuk di dalamnya sejumlah artis cantik yang menempati posisi penting dalam tim. Pada kalimat tersebut, terdapat pernyataan dari jurnalis yang menuliskan kata-kata “bukan melulu soal pasangan calon dalam Pilgub, tetapi juga sejumlah artis yang menempati posisi penting”. Pernyataan yang dituliskan oleh jurnalis tersebut, merupakan contoh dari fakta psikologis.

Dari pedoman pembuatan berita yang dilansir melalui <http://about.sindonews.com/#tentang-kami> salah satunya ialah berita yang dipublikasikan tidak memuat unsur prasangka. Berdasarkan redaksi yang telah dibuat oleh Koran Sindo dalam pedoman pemberitaan, adanya unsur tersebut, jika dilihat dari sisi redaksional Sindo, maka jurnalis Koran Sindo dalam pembuatan berita tersebut memasukkan unsur prasangka, yang memberikan pernyataan dari persoalan mengenai Pilkada DKI Jakarta yang juga melibatkan artis yang menempati posisi penting.

Contoh fakta kombinasi yang terdapat pada Koran Sindo yaitu berita pada tanggal 30 September 2016, dengan judul “DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin”. Berita yang berisikan “DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya berani dan tegas, namun juga memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. Jakarta pernah memimpin dengan kualitas seperti itu, yakni ketika dipimpin gubernur Ali Sadikin. Karakter seperti Ali Sadikin ini sangat diharapkan akan lahir melalui Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari 2017. Kalimat yang terdapat pada DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya berani dan tegas, namun juga memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil merupakan fakta sosiologis dan fakta psikologisnya ialah karakter seperti Ali Sadikin ini sangat diharapkan akan lahir melalui Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari 2017, sehingga gabungan dari kedua fakta tersebut disebut sebagai fakta kombinasi.

### DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin

**JAKARTA** – DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya berani dan tegas, namun juga memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. Jakarta pernah memiliki pemimpin dengan kualitas seperti itu, yakni ketika dipimpin gubernur Ali Sadikin. Karakter seperti Ali Sadikin ini sangat diharapkan akan lahir melalui Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 15 Februari 2016.

Saya melihat keberanian, ketegasan, dan keberpihakan Ali Sadikin kepada rakyat. Satu hal lagi yang menonjol, Ali Sadikin tidak ada main dengan pengembang,” ujar anggota DPD asal daerah pemilihan DKI Jakarta AM Fatwa pada diskusi yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, kemarin.

Fatwa yang pernah menjadi asisten pribadi Ali Sadikin ini mengatakan, dia cukup dekat dengan sang gubernur legendaris tersebut, termasuk pernah menjadi penasihat politik dan penasihat agamanya. Namun, selama periode bersama Ali Sadikin itu, dia melihat tidak pernah ada permainan yang dilakukan sang gubernur dengan konglomerat, termasuk kalangan pengembang. Sebaliknya, Ali Sadikin yang

akrab disapa Bang Ali, justru berani menindak tegas mereka jika ada pelanggaran.

Ketegasan Bang Ali yang merupakan purnawirawan TNI AL berpangkat letnan jenderal dalam membangun Jakarta, kata Fatwa, terlihat dari kebijakannya melebarkan Jalan Gunung Sahari. Bang Ali waktu itu berani memerintahkan agar markas Armada Pangkalan Barat (Armabar) TNI AL dipangkas demi pelebaran jalan.

“Mabas TNI Angkatan Laut itu yang lebih dahulu dia potong, almamaternya sendiri,” cerita Fatwa.

Calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno yang juga jadi pembicara diskusi menegaskan, dirinya berkomitmen membangun Jakarta agar lebih baik lagi. Dia mengaku warga Jakarta kini mendambakan hadirnya pemimpin yang bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. “Saya sudah berkeliling dan mereka (masyarakat) mengaku merindukan pemimpin baru,” ujarnya.

Adapun politikus Partai Hanura Dadang Rusdiana mengklaim kandidat yang diusung partainya, yakni pema-hana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sama tegas dengan

Ali Sadikin dalam membangun Ibu Kota.

“Kita butuh sosok yang mampu melakukan langkah-langkah nyata, walaupun kontroversial,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPWPAN/DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal sebagai Eko Patrio menceritakan dinamika pencalonan di partainya, sebelum akhirnya memutuskan mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni untuk Pilkada DKI Jakarta.

Keputusan mendukung Agus-Sylviana diakuinya tidak melalui proses instan seperti banyak diduga orang, tetapi melalui rapat yang dilakukan berkali-kali. “Tidak mudah, karena awalnya kami salah satu partai yang menandatangani petisi untuk membawa Risma ke Jakarta,” ujarnya.

● helmi syarif



||  
[  
K  
M.  
Ke  
(K  
sai  
pe  
bu  
di  
pe  
ha  
bit  
dis  
pih  
Mi  
Kc  
Se  
du  
ne  
t.  
Mi

**Gambar 3.3**  
**Contoh Berita Fakta Kombinasi di Koran Sindo**

Selain Koran Sindo, berikut beberapa contoh kategori *factualness* yang terdapat di Harian Kompas. Fakta sosiologis yang terdapat pada Harian Kompas ialah berita pada tanggal 1 Oktober 2016, dengan judul berita yaitu “Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan”. Isi berita tersebut ialah “hingga kemarin, mayoritas pasangan calon belum melengkapi seluruh syarat pendaftaran. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan adalah 4 Oktober”. Isi dari berita tersebut menunjukkan bahwa fakta yang disampaikan dalam berita merupakan fakta sosiologis sesuai dengan kejadian faktual di lapangan.

Fakta psikologis, merupakan fakta terbanyak setelah fakta kombinasi yang terdapat pada Harian Kompas. Fakta psikologis terdapat pada berita tanggal 15 Oktober 2016, dengan judul berita yaitu “Ribuan Saksi Dikerahkan di Pilkada”. Berita tersebut menyebutkan bahwa puluhan ribu saksi akan dikerahkan masing-masing tim pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk mengawasi setiap tahapan pemungutan suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Langkah itu diharapkan mencegah kecurangan yang merugikan pasangan calon. Pada kalimat yang disampaikan, maka dapat dilihat kata “akan dikerahkan” yang menunjukkan perencanaan yang akan dilakukan oleh puluhan ribu saksi untuk mengawasi Pilkada DKI Jakarta 2017, dan terdapat kata “diharapkan” yang menunjukkan harapan dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta untuk mencegah kecurangan. Dari kedua kata tersebut, menunjukkan bahwa masih adanya harapan dan perencanaan yang akan dilakukan yang belum terlaksana, sehingga menunjukkan fakta psikologis.

Pada kategori *factualness*, perbedaan yang dapat dilihat dari kedua media cetak tersebut adalah, Harian Kompas lebih banyak menampilkan fakta sosiologis jika dibandingkan dengan Koran Sindo, artinya Harian Kompas lebih

menonjolkan berita berdasarkan fakta di lapangan tanpa memasukkan unsur pernyataan narasumber dibandingkan dengan Koran Sindo. Dari beberapa berita yang telah diteliti, Koran Sindo lebih banyak menampilkan fakta psikologis dibandingkan dengan Harian Kompas. Sindo lebih menampilkan isi berita yang diperoleh melalui pernyataan atau pendapat jurnalis yang dikaitkan dengan isi berita mengenai Pilkada DKI Jakarta.



**Gambar 3.4**  
**Contoh Berita Fakta Sosiologis di Harian Kompas**

# Ribuan Saksi Dikerahkan di Pilkada

Pengawasan di TPS Diperketat

JAKARTA, KOMPAS – Puluhan ribu saksi akan dikerahkan masing-masing tim pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk mengawasi setiap tahapan pemungutan suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Langkah itu diharapkan mencegah kecurangan yang merugikan pasangan calon.

**Gambar 3.5**  
Contoh Berita Fakta Psikologis di Harian Kompas

Partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyiapkan lebih dari 45.000 saksi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Partai Gerindra M Taufik mengatakan, para saksi disiapkan dari struktur partai pendukung, yaitu Gerindra dan PKS. Mereka akan disebar di tiap tempat pemungutan suara (TPS), di tingkat kecamatan, kota dan kabupaten, hingga provinsi.

"Jumlah pengawas diperbanyak (dari pemilu atau pilkada lalu). Biasanya dua orang per TPS, sekarang tiga. Ditambah dengan relawan yang tanpa bayar, jadi mungkin sampai 40 orang mengawasi untuk kami di tiap TPS," katanya, Jumat (14/10).

Dengan 15.059 TPS di DKI Jakarta, jumlah saksi di tingkat TPS saja mencapai 45.177 orang. Para saksi harus memenuhi syarat, antara lain, terdaftar di daftar pemilih tetap di wilayah yang diawasi. Mereka dibayar dengan sistem honor dan menurut rencana dilatih setelah penetapan nomor calon, 25 Oktober.

Menurut Taufik, peningkatan pengawasan ini karena adanya indikasi kemungkinan kecurangan. Jumlah saksi diperbanyak sebagai cadangan untuk menggantikan saksi lainnya harus pergi sehingga TPS tak pernah kosong dari pengawasan.

Jumlah saksi yang besar diakui akan memperbesar anggaran partai untuk pelaksanaan Pilkada DKI.

"Tetapi, ya, memang sudah tanggung jawab kami. Kami pernah punya pengalaman buruk dicurangi. Sudah terbukti sebelum-sebelumnya. Ada rombongan orang dari luar TPS didatangkan ikut *nyoblos*," katanya.

Mendekati masa kampanye, Anies dan Sandiaga turun ke sejumlah tempat untuk sosialisasi. Sandiaga mengatakan, saat ini pihaknya tengah mematangkan strategi kampanye dan biayanya.

Basis-basis relawan dan simpatisan Anies-Sandiaga disiapkan setidaknya di 2.700 lokasi di DKI.

Juru Bicara Anies-Sandiaga Alexander Yahya Datuk mengatakan, Sandiaga telah mengeluarkan biaya Rp 29,3 miliar dari dana pribadi untuk periode sosialisasi November 2015-September 2016 ini.

**26.000 saksi**

PDI-P menyiapkan 26.000 saksi untuk mengawasi TPS saat pemungutan suara. Tiap-tiap TPS diawasi dua saksi.

Eriko Sotarduga, Juru Bicara Tim Pemungutan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, PDI-P sedang menjalankan *training on trainer* berjenjang untuk calon saksi.

Para saksi akan dibekali kemampuan untuk melaporkan temuan dan pelanggaran di TPS. Mereka juga akan melaporkan kecurangan-kecurangan selama pemungutan dan penghitungan suara kepada Bawaslu.

"Kami masih menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk dana saksi parpol. Nanti itu semua akan dilampirkan dalam transparansi anggaran di KPU DKI," kata Eriko.

Parpol pengusung, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura, juga mulai menyiapkan logistik kampanye seperti kaos dan alat peraga kampanye sembari menunggu nomor urut resmi dari KPU DKI. Sarana dan prasarana diadakan secara gotong royong. Namun, belum ada rincian dana untuk kebutuhan ini.

Eriko menambahkan, bakal pasangan calon petahana itu masih fokus bekerja dan menyelesaikan tugas di DKI Jakarta. Apalagi, keduanya berniat untuk tidak mengajukan cuti. Saat ini, gugatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur tentang cuti petahana sedang berproses di Mahkamah Konstitusi.

Nantinya, jika gugatan di MK tentang aturan cuti itu tidak dikabulkan, Basuki-Djarot juga berkomitmen untuk kampanye secara damai. Tim sukses berharap pesta politik DKI ini menjadi kegembiraan politik, bukan alat perpecahan yang tidak diinginkan.

Sebagai petahana, Basuki-Djarot juga akan mempertahankan program yang dinilai sudah baik dan efektif. Adapun program yang belum optimal akan dievaluasi dan disempurnakan.

(RE/DEA)

**PILKADA**

## Modal Kampanye Andalkan Partisipasi

JAKARTA, KOMPAS – Partisipasi aktif para relawan tampaknya menjadi andalan para calon gubernur dan pasangannya dalam mengumpulkan modal untuk berkampanye serta menjangkau dukungan massa. Strategi ini paling tidak sudah ditunjukkan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, Minggu (2/10), menyatakan, Teman Ahok akan bergabung dalam tim pemenangan gabungan partai politik pengusung, yakni PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar. Dengan demikian, aktivitas Teman Ahok berubah dari relawan pengumpul KTP menjadi relawan pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Amalia menambahkan, pengumpulan dana masih mengandalkan penjualan cendera mata, selain kegiatan lain, seperti konser musik dan festival. Promosi dilakukan melalui situs internet yang diluncurkan ulang pada Sabtu lalu. "Kami menjaga konsep partisipasi yang selama ini dibangun Teman Ahok," ujarnya.

Selain dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, hasil penggalangan dana juga dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

**Berbaur di HBKB**

Pada Minggu pagi, Agus Yudhoyono didampingi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono, ibu Ani Yudhoyono, dan istrinya, Annisa Larasati Pohan, berbaur bersama warga DKI Jakarta dalam acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sylviana Murni, bakal calon wakil gubernur pasangan Agus, turut hadir di acara itu.

Agus juga bertemu puluhan orang yang tergabung dalam Agus Fans Club dan KaribAgus. Kelompok pendukung ini dibentuk *swadaya* dan dipastikan berperan penting selama masa pilkada. "Mereka akan bantukenalkan saya kepada warga DKI. Target pemilih pemula dan wanita sangat rasional," kata Agus.

Tim pemenangan nantinya terdiri atas koalisi Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menambahkan, tim pemenangan Agus-Sylvi belum resmi terbentuk. Anggota tim tidak dipilih menurut perolehan kursi. "Ada banyak tokoh yang terlibat, termasuk nonpartai," katanya.

**Syarat belum lengkap**

Agus Yudhoyono masih harus melengkapi beberapa syarat calon dan pencalonan. Persyaratan itu harus diserahkan ke KPU DKI Jakarta paling lambat 4 Oktober. Salah satu syarat yang belum dilengkapi adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (MKN/C05)

Lihat Video Terkait "Cagub DKI Jakarta Saling Sindir" di [kompasprint.com/vod/cagubsalingsindir](http://kompasprint.com/vod/cagubsalingsindir)

**Gambar 3.6**  
Contoh Berita Fakta Kombinasi di Harian Kompas

Fakta kombinasi di Harian Kompas terdapat pada tanggal 3 Oktober 2016, yang berjudul “Modal Kampanye Andalkan Partisipasi”. Isi berita tersebut ialah partisipasi para relawan tampaknya menjadi andalan para calon gubernur dan pasangannya dalam mengumpulkan modal untuk berkampanye serta menjangkau dukungan massa. Strategi ini paling tidak sudah ditunjukkan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Pada kalimat tersebut terdapat kata “tampaknya” yang merupakan interpretasi subjektif dari penulis berita, sehingga termasuk pada kategori fakta psikologis. Fakta sosiologis yang terdapat dalam kalimat tersebut ialah “strategi tersebut sudah dilakukan oleh Ahok dan juga Agus” yang menunjukkan bahwa kedua pasangan calon sudah melakukan strategi tersebut di lapangan yang artinya menunjukkan fakta sosiologis, sehingga berita tersebut merupakan fakta kombinasi.

### **3. Hasil Analisis Berdasarkan Kategori *Completeness***

Pada kategori *completeness* berita yang dimuat di media cetak merupakan berita yang mengandung kelengkapan unsur berita. Kelengkapan unsur berita biasanya menggunakan rumus 5W+1H. Unsur-unsur berita 5W+1H tersebut, ialah: *what* (peristiwa apa yang sedang terjadi), *who* (siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut), *when* (kapan peristiwa tersebut terjadi), *where* (dimana peristiwa tersebut terjadi), *why* (mengapa peristiwa tersebut terjadi), *how* (bagaimana peristiwa tersebut terjadi). Kelengkapan unsur berita akan maksimal apabila tiap berita memuat keenam unsur berita yang digunakan (Ispandriarno, 2014:160).

Hasil analisis pemberitaan mengenai Pilgub DKI Jakarta 2016 pada Harian Kompas dan Koran Sindo pada tanggal 19 September-23 Oktober 2016 mengenai kategori *completeness*, didapatkan hasil sebagai berikut:

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Lengkap	III III III III III	25	83,33%	III III III III III III II	32	86,48%
Tidak ada unsur <i>What</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak ada unsur <i>Who</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak ada unsur <i>When</i>	-	-	-	III	3	8,11%
Tidak ada unsur <i>Where</i>	-	-	-	II	2	5,41%
Tidak ada unsur <i>Why</i>	III	3	10 %	-	-	-
Tidak ada unsur <i>How</i>	II	2	6,67%	-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>		30	100 %	<b>Total</b>	37	100%

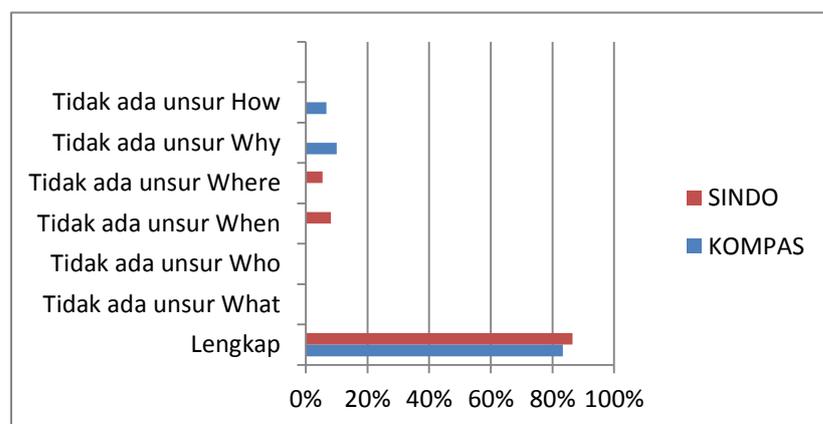
**Tabel 3.5 Hasil Analisis *Completeness*  
Sumber: Data Coding 2016**

Dari tabel di atas dengan menggunakan hasil *coding sheet* pada kedua media, didapatkan hasil 83,33% Harian Kompas menunjukkan kelengkapan pada unsur berita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompas memiliki jumlah persentase yang cukup besar, dengan persentase 83,33% pada unsur lengkap (5W+1H), unsur yang lengkap pada Harian Kompas berjumlah 25 berita. Hal ini menunjukkan bahwa, Harian Kompas dalam menyajikan berita pada kategori *completeness* memperhatikan unsur 5W+1H dengan memuat unsur apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana.

Persentase yang cukup besar juga dapat dilihat dari Koran Sindo, yaitu sebesar 86,48% pada unsur kelengkapan 5W+1H. Koran Sindo lebih unggul jika dibandingkan dengan Kompas dalam persentase yang telah dianalisis.

Dari jumlah berita Sindo sebanyak 36 berita, berita yang melengkapi unsur 5W+1H berjumlah 32. Kedua media tersebut sangat memperhatikan unsur 5W+1H (lengkap) pada kategori *completeness*, sehingga menunjukkan media yang objektif karena memiliki jumlah persentase yang cukup besar. Tidak ada unsur “apa” dan “siapa” pada kedua media, tidak ditemukan satu pun, sehingga baik Harian Kompas maupun Koran Sindo selalu menampilkan unsur apa dan siapa pada berita yang disajikan. Tidak ada unsur *when* dan *where*”, tidak ditemukan satu pun di Harian Kompas. Namun, terdapat unsur yang tidak mengandung *how* dan *why* di Harian Kompas dengan jumlah 3 berita yang tidak mengandung unsur *why*, dan 2 berita yang tidak mengandung unsur *how*.

Pada Koran Sindo tidak ditemukan adanya “unsur yang tidak mengandung *what, who, why* dan *how*”, sehingga unsur *what, who, why* dan *how* terpenuhi dalam berita Pilgub DKI Jakarta periode 19 September-23 Oktober 2016 di Koran Sindo. Unsur yang tidak mengandung *when, where*, ditemukan pada Koran Sindo, dengan jumlah yang tidak mengandung unsur *when* berjumlah 3 berita, berita yang tidak mengandung unsur *where* 2 berita.



**Tabel 3.6**  
**Ilustrasi Persentase *Completeness***

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase terbanyak ditunjukkan pada kategori “lengkap” di Harian Kompas maupun Koran Sindo yang mencapai lebih dari 80%. Dari unsur 5W+1H, unsur yang tidak ditemukan di Koran Sindo dan Harian Kompas ialah unsur *who* dan *what*, yang artinya ialah unsur *who* dan *what* terdapat pada semua berita mengenai Pilgub DKI Jakarta 2016 di Harian Kompas dan Koran Sindo. Meskipun Harian Kompas memiliki jumlah persentase yang cukup tinggi pada kategori *completeness*, tetapi masih terdapat berita yang tidak memiliki unsur *why* dan *how*, terdapat 3 berita yang tidak memiliki unsur *why* pada kategori *completeness*.

Contoh berita yang tidak memiliki unsur *why* pada Harian Kompas ialah berita pada tanggal 23 September 2016 yang membahas tentang “Empat parpol jagokan Agus Yudhoyono”. Berita tersebut, tidak menjelaskan mengapa 4 parpol mendukung Agus sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, hal tersebut dapat dilihat pada berita yang mengatakan pertemuan di Cikeas. “Keputusan diusungnya Agus diambil dalam pertemuan di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (22/9). Hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua UMUM PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy”. Dari berita yang telah disajikan tersebut, tidak terdapat penjelasan mengapa Agus dijagokan oleh ke-empat parpol yang telah dijelaskan, akan tetapi hanya memberikan informasi siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan analisis peneliti, tidak terdapatnya unsur *why* pada berita yang berjudul “Empat parpol jagokan Agus Yudhoyono” karena adanya unsur politik yang tidak dimunculkan seperti dijagokannya Agus dari ke-empat partai (PPP, PKB, PAN, Demokrat). Selain itu, dijagokannya Agus oleh ke-empat partai

karena mencari calon yang sepadan untuk bisa mengimbangi Ahok (strategi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bisa mengalahkan Ahok), yang juga merupakan anak dari SBY. Seperti yang diketahui bahwa, Pilkada DKI Jakarta bukan sekedar pertarungan tingkat daerah. Akan tetapi, ini juga merupakan perang antara Presiden ke-lima yaitu Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-enam RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

**PILKADA**

## Empat Parpol Jagokan Agus Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS — Empat partai politik dikabarkan sepakat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi bakal calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta. Empat partai itu adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Namun, keputusan itu masih bisa berubah karena pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditutup pada Jumat (23/9) malam ini.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga semalam masih menggelar pertemuan untuk menentukan calon yang akan diusung. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Sandiaga Uno yang disebut sebagai calon yang akan diusung di pilkada serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

Jika Gerindra dan PKS memutuskan mengusung pasangan sendiri, akan ada tiga pasang calon yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta.

Polisi Pantau Media Sosial

**HAL 27**

**Gambar 3.7**  
**Contoh Berita yang Tidak Mengandung Unsur *Why* di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 6)**



**Gambar 3.8**  
**Contoh Berita yang Tidak Mengandung Unsur *How* di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 14)**

Berita pada tanggal 1 Oktober 2016 di atas, menunjukkan bahwa berita tersebut tidak mengandung unsur *how*. Dapat dilihat pada berita yang berjudul “Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan”, menjelaskan bahwa mayoritas pasangan calon belum lengkapi persyaratan, seperti surat keterangan catatan kepolisian, surat bebas pajak lima tahun, dan surat pailit dari pengadilan negeri. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Sandiaga Uno optimis seluruh berkas persyaratan telah dilengkapi. Ahok juga mengaku belum mengajukan cuti selama masa kampanye mulai 25 Oktober, dan Agus-Sylviana belum memberikan konfirmasi hingga pukul 19.00. Dari keterangan ketiga pasangan calon tersebut, dapat dilihat penjelasan mengenai perlengkapan berkas apa saja yang belum dilengkapi oleh cagub dan cawagub, seperti surat keterangan catatan kepolisian, surat bebas pajak 5 tahun, dan surat pailit dari pengadilan negeri. Sementara itu tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan pasangan calon tersebut mengenai persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga berita tersebut tidak mengandung unsur *how*.

Sementara itu berita di Harian Kompas yang mengandung unsur lengkap (5W+1H) pada periode 19 September-23 Oktober 2016 ialah berita dengan judul “Basuki Didesak Berhati-hati” pada tanggal 11 Oktober 2016. Berita dengan judul tersebut mengandung kesemua unsur 5W+1H, sehingga memiliki unsur yang lengkap pada kesemua kategori *completeness*. Berita tersebut menjelaskan tentang Ahok meminta maaf atas perkataannya saat pidato di Kepulauan Seribu, 27 September. Sejumlah pihak pun mendesak Ahok berhati-hati berbicara di depan publik.



**Gambar 3.9**  
**Contoh Berita yang Lengkap di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 25)**

Pada Koran Sindo terdapat 3 berita yang tidak memiliki unsur *when* dan 2 berita yang tidak mengandung unsur *where*. Persentase berita yang tidak

mengandung unsur *when* ialah 8,11% dari total berita pada Koran Sindo yaitu 36 berita, dan yang tidak mengandung unsur *where* persentasenya sebesar 5,41%. Berita yang tidak terdapat unsur *when* dan *where* di Koran Sindo terdapat pada Koran tanggal 22 September 2016 dengan judul “Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik”. Berita tersebut menjelaskan kebijakan Ahok yang dinilai tidak terencana dengan matang sehingga berpotensi menimbulkan konflik, dan juga minim melibatkan partisipasi publik. Tidak diberitakan mengenai kapan berita tersebut terjadi, dan juga dimana terjadinya peristiwa tersebut. Berita mengenai kebijakan Ahok pada Koran Sindo lebih banyak menjelaskan mengapa dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, tanpa memberikan informasi mengenai kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi. Berikut contoh berita yang tidak memiliki unsur *when* dan *where* pada Koran Sindo:

**JAKARTA** – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak terencana dengan matang sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Gubernur juga minim melibatkan partisipasi publik.

Menurut Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, sejak memimpin Ibu Kota, Ahok tidak pernah menggunakan kebijakan publik. Tidak mengherankan bila setiap kebijakan yang dikeluarkan kerap memunculkan persoalan, padahal Pemprov DKI memiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berwenang menjangkau aspirasi warga sebagai masukan gubernur. "Segala kebijakan harus matang. Publik harus dilibatkan. Tanpa partisipasi publik,

kebijakan hanya popularitas semata," ujar Trubus kemarin. Menurut dia, kebijakan publik memang membutuhkan waktu agar semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Maka itu, dahulu ada yang namanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Artinya regulator tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil sebuah kebijakan yang keluar dari rencana. "Setiap penggusuran selalu terjadi masalah. Apa salahnya meniru gaya Joko Widodo yang selalu turun ke lapangan untuk

an yang dibuat Ahok banyak dipengaruhi pengusaha, bukan rakyat kecil." papar Trubus.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga sepakat dengan Trubus. Dia menilai munculnya konflik di DKI akibat kepemimpinan

Ahok yang tidak mau mendengarkan aspirasi warga. Dalam mewujudkan visi misi yang merupakan janji kepala daerah terhadap warganya saat meminta dukungan, Ahok seharusnya membangun suasana kondusif

dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak saling dukung seperti yang terlihat saat ini.

Misalnya dalam penanganan banjir yang menjadi prioritas dalam visi misi Jakarta Baru. Seharusnya bila Jakarta masih banjir, Ahok tidak menyalahkan kinerja anak buahnya. Sebaiknya Ahok menunjukkan empatinya kepada warga terdampak banjir, menunjukkan rasa prihatin, bahkan kalau perlu blusukan ke lokasi banjir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan, pemba-

nya dalam penertiban Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Seharusnya apabila sesuai perencanaan, warga tidak akan menjadi korban pengusuran dan tentunya kehidupannya menjadi lebih layak.

Kemudian pembangunan jalan layang Semanggi yang menggunakan biaya dari koefisien lantai bangunan (KLB) dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana *corporate social responsibility* (CSR). Jika dilihat dari sisi kebutuhan warga, jalan layang Semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan roda empat.

gunakan untuk membangun kegiatan prioritas yang direncanakan," ujarnya.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bahwa semua kebijakan dan pembangunan yang dilakukannya di luar perencanaan. Semua pembangunan untuk memenuhi kebutuhan warga. Misalnya pembangunan RPTRA adalah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan, warga dapat menuntaskannya dengan berkumpul di RPTRA, termasuk untuk fasilitas bermain anak-anak, sekaligus melakukan kegiatan apapun.

Gambar 3.10

Contoh Berita yang Tidak Memiliki Unsur *When* dan *Where* di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 5)

**JAKARTA** – Elektabilitas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat terus merosot. Fakta tersebut berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Pada Maret 2016, keterpilahan pasangan petahana tersebut di angka 59,3%. Namun pada survei selanjutnya terus menunjukkan penurunan yang tajam, yakni 49,1% (Juli), dan hanya 31,4% (Oktober).

Pasangan pesaing, Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni masing-masing mendapatkan 21,1% dan 19,3%, sedangkan 28,2% responden belum menentukan pilihan.

Peneliti LSI Adjie Alfaryy menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, dan

Partai Hanura tersebut kehilangan simpati dari masyarakat. Salah satunya terkait sikapnya yang kerap bersitegang dengan warga, khususnya saat melakukan penertiban kawasan.

"Dan di lain pihak, warga memandang Ahok lebih pro ke kelompok atas dalam hal pengurusan dan reklamasi, maupun Sumber Waras," ujar Adjie saat memaparkan hasil kajiannya di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta, kemarin.

Isu kepribadian juga menjadi pemacu. Menurut dia, karakter Ahok yang kerap mempertontonkan kekerasan, congkak, dan tidak konsisten membuat dukungan kepadanya berkurang. Pada

saat bersamaan, Ahok juga diterpa isu primordial, yakni anggapan warga muslim harus dipimpin oleh sesamanya. "Isu etnis juga memengaruhi. Muncul ketakutan apabila Ahok menang maka perekonomian akan dikuasai oleh kalangan nonmuslim," lanjut Adjie.

Di sisi lain, kehadiran Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang muncul dengan rekam jejak yang mumpuni dan dapat bersaing untuk melawan atau melampaui petahana, juga semakin menurunkan elektabilitas Ahok.

"Anies Baswedan memiliki track record baik, pernah sebagai menteri dan memang sosok yang bisa mengimbangi Ahok di kelompok menengah atas.

((dari Hal 1

"Masalahnya semua kartu Ahok sudah dikeluarkan," ujarnya kemarin.

Menurut dia, dalam kondisi demikian tak ada jalan lain bagi Ahok selain mengubah strategi di sisa waktu yang ada. Isu yang selama ini diandalkan seperti birokrasi yang bersih, penegakan ketertiban umum dengan cara apa pun, termasuk dengan cara menggusur, harus diubah, bahkan sebagian ditinggalkan karena terbukti tidak populer. Gaya komunikasi Ahok yang kasar juga harus diubah.

NEWSISRA TRIANISYAH

Gambar 3.11

Contoh Berita yang Lengkap di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 17)

#### 4. Hasil Analisis Berdasarkan Kategori Panjang Berita

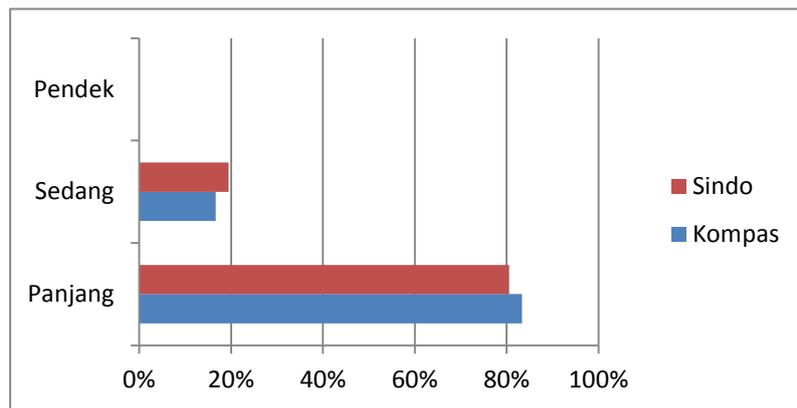
Panjang berita menunjukkan kelengkapan informasi yang disampaikan terhadap sebuah kasus. Panjang berita dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori panjang, sedang, dan pendek. Berita yang termasuk kategori panjang ialah lebih dari 10 paragraf, sehingga semakin banyak berita yang disajikan, berarti semakin lengkap beragam informasi yang disampaikan. Kategori sedang ialah terdiri dari 6-10 paragraf yang memungkinkan berita tidak memiliki informasi seperti pada kategori pertama. Kategori pendek ialah kurang dari 6 paragraf, dianggap sebagai informasi yang ringan bagi pembaca, sehingga jumlah paragraf hanya mendapat porsi yang sedikit.

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Panjang	III III III III III	25	83,33 %	III III III III III III	29	80,56%
Sedang	III	5	16,67 %	III II	7	19,44%
Pendek	-	-	-	-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>		30	100 %	<b>Total</b>	36	100%

**Tabel 3.7 Hasil Analisis Panjang Berita**  
Sumber: Data Coding 2016

Berdasarkan hasil *coding* pada Harian Kompas, jumlah panjang berita yang termasuk pada indikator panjang ialah 25 berita atau sebesar 83,33% dari total berita yaitu 30 berita. Indikator sedang pada panjang berita berjumlah 5 berita atau sebesar 16,67%, dan tidak terdapat satu pun indikator pendek pada Harian Kompas. Sedangkan pada Koran Sindo terdapat 29 berita yang termasuk indikator panjang atau sebesar 80,56% dari total berita yaitu 36 berita di Koran Sindo. Indikator sedang pada kategori panjang berita di Koran Sindo berjumlah 7 berita atau sebesar 19,44%. Harian Kompas dan Koran Sindo tidak terdapat satu pun berita yang termasuk indikator pendek pada kategori panjang berita. Dari kedua

media tersebut, pada kategori panjang berita, Koran Sindo memiliki persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan Kompas, termasuk pada indikator “panjang” dan juga “sedang”, sehingga Sindo menyajikan berita yang lebih banyak memberikan informasi.



**Tabel 3.8**  
**Ilustrasi Persentase Panjang Berita**

Contoh berita yang termasuk indikator panjang pada Harian Kompas ialah berita pada tanggal 21 September 2016, dengan judul “Pertarungan Ide Menentukan”, pada Koran Sindo berita yang termasuk indikator panjang ialah berita pada tanggal 19 September 2016 dengan judul “Penolakan Ahok Makin Meluas”. Contoh berita yang termasuk indikator sedang pada Harian Kompas ialah berita pada tanggal 1 Oktober 2016, dengan judul “Pasangan Calon Belum Lengkapi Persyaratan”, dan pada Koran Sindo berita yang termasuk indikator sedang ialah berita pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan judul berita yaitu “Calon Gubernur DKI Mulai Bergerilya”. Berikut contoh-contoh berita yang termasuk pada kategori panjang berita:





Gambar 3.14  
Contoh Berita yang Termasuk Indikator Sedang di Harian Kompas

## Calon Gubernur DKI Mulai Bergerilya

Agus Lari Pagi di Senayan, Anies Sapa Warga Tanah Merah

**JAKARTA** – Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta mulai bergerilya. Agus Harimurti Yudhoyono menyapa masyarakat saat lari pagi pada ajang *Car Free Day* (CFD) di Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Sementara cagub lain, Anies Baswedan mengunjungi warga Tanah Merah, Jakarta Utara.

Kehadiran Agus pada *Car Free Day* memang mengundang perhatian warga. Mereka berupaya mendekat, mengajak bersalaman, dan berfoto bersama. Apalagi suami Annisa Pohan itu didampingi istrinya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga mantan presiden beserta sang ibu Ani Yudhoyono.

Agus mengaku dulu sering

melakukan lari pagi pada *Car Free Day*. "Tapi, karena kesibukan jabatan di komandan batallion ketika itu, jadi kurang," katanya kemarin. Lari pagi ini tak semata dilakukan untuk kampanye. "Lari olahraga paling murah meriah, bisa dilakukan di mana saja, bisa juga beramai-ramai," tambahnya.

Dari Senayan, Agus dan ke-

luarga menuju Sarinah. Mereka menghadiri peringatan Hari Batik Nasional bersama 1.000 pramuka. Pendamping Agus pada Pilkada DKI 2017, Sylviana Murni, sudah menunggu. Sylviana juga dikenal sebagai ketua Kwartir Pramuka Se-DKI Jakarta.

Menurut Agus, dirinya dan Sylviana memilih memperkuat dukungan dengan membentuk relawan-relawan untuk menarik simpatic masyarakat DKI salah satunya mendeklarasikan relawan seperti Karib Agus. "Semakin banyak relawan yang bermunculan semakin kuat dukungan. Terpenting para pendukung tidak melakukan *black campaign*. Pada saatnya nanti kita akan menjabarkan visi dan misi," ucap Agus. Pasangan Agus-Syl-

**"Semakin banyak relawan yang bermunculan semakin kuat dukungan. Terpenting para pendukung tidak melakukan black campaign. Pada saatnya nanti kita akan menjabarkan visi dan misi."**

**AGUS HARIMURTI YUDHOYONO**  
Cagub DKI Jakarta

viana ini diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.

Pendekatan dengan masyarakat juga dilakukan cagub Anies Baswedan. Kemarin mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu bertatap muka dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, untuk mendengarkan aspirasi mereka. "Saya ingin dekat dengan warga dan menghormatinya. Teman-teman di sini punya ancaman pengusuran. Mereka sempat bolak-balik tanpa kepastian, sempat ingin digusur, tapi tidak jadi," kata Anies.

Anies saat itu tidak didampingi calon wakil gubernur (cawagub) Sandiaga Uno. Sandiaga tengah meramaikan acara *Car Free Day* di Sudirman-MH

Thamrin. Pengusaha yang memiliki hobi lari itu berusaha menyelesaikan nazarnya untuk berlari di lima wilayah DKI Jakarta dengan mengelilingi Jakarta Pusat terlebih dahulu sebelum berlari di empat wilayah lain.

Dia mengungkapkan strateginya bila dirinya dan Anies terpilih memimpin Jakarta periode 2017-2022, dirinya akan fokus pada bidang ekonomi dan infrastruktur. Sedangkan Anies akan menangani masalah institusi dan kemanusiaan.

Di bidang ekonomi, pasangan Anies-Sandiaga akan membuat pusat-pusat kewirausahaan di 44 kecamatan. Sandiaga juga akan membidik 200.000 pengusaha baru di bidang teknologi, bisnis manajemen, dan

pengelolaan sampah. Untuk stabilitas harga, dia berencana menyederhanakan rantai distribusi melalui kerja sama dengan BUMD, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

Di tempat terpisah, cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sebagai petahana dirinya bersama cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya fokus kerja menuntaskan masa jabatan hingga Oktober 2017. "Tidak adalangkah pemenuhan kecurial kita fokus kerja. *Ingeet loh* ya kita *incumbent* kerja sampai Oktober 2017. Jadi kita tidak terpengaruh strategi apa. Pokoknya kerja mengalir saja, nikmat dengan gembira," ucap Djarot.

**• bima setiyadi**

Gambar 3.15  
Contoh Berita yang Termasuk Indikator Sedang di Koran Sindo

## 5. Hasil Analisis Berdasarkan Kategori Relevansi

Relevansi dalam pemberitaan, berkaitan dengan nilai-nilai berita yang ada dalam pemberitaan. Nilai-nilai berita tersebut diantaranya ialah: Kebaruan /*Timeliness* (berita yang menyangkut hal baru yang terjadi, aktual dan terkini), *Significance* (berkaitan dengan kejadian yang memungkinkan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau berita yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca), *Magnitude* (kejadian yang berkaitan dengan hal-hal besar secara kuantitatif yang berarti bagi kehidupan manusia, akan menarik dan menggugah rasa ingin tahu pembaca), *Conflict* (perang, perkelahian, pergaulatan dalam bidang politik, bisnis, olahraga sangat menarik minat pembaca), Jarak /*Proximity* (kejadian yang dekat dengan pembaca akan menarik perhatian pembaca, kedekatan tersebut diantaranya ialah geografis maupun emosional), Ketenaran /*Prominance* (hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal pembaca, seperti orang, tempat, benda yang memiliki nilai tertinggi. Masyarakat akan suka membaca aktivitas para pemimpin, artis, dan sebagainya).

Pada analisis ini dibagi menjadi relevan dan tidak relevan. Relevan ialah apabila mencakup keseluruhan nilai-nilai berita pada berita tersebut. Tidak relevan ialah apabila tidak mencakup keseluruhan nilai-nilai berita pada berita tersebut (apabila tidak terdapat salah satu unsur nilai berita). Berikut hasil analisis berdasarkan kategori relevansi melalui hasil *coding*:

Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Relevan	<del>III III III</del> III	18	52,95%	<del>III III III</del> <del>III III</del>	25	59,52%
Tidak terdapat unsur	-	-	-	II	2	4,77%

<i>timeliness</i>						
Tidak terdapat unsur <i>significance</i>	III	3	8,82%	I	1	2,39%
Tidak terdapat unsur <i>magnitude</i>	III I	6	17,64%	III III	9	21,42%
Tidak terdapat unsur <i>conflict</i>	III II	7	20,59%	III	5	11,90%
Tidak terdapat unsur <i>proximity</i>	-	-	-	-	-	-
Tidak terdapat unsur <i>prominence</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>		34	100 %	<b>Total</b>	42	100%

**Tabel 3.9 Hasil Analisis Relevansi**  
**Sumber: Data Coding 2016**

Berdasarkan tabel di atas pada kategori relevansi, indikator yang tertinggi dari unsur-unsur berita lainnya terdapat pada indikator “relevan” dengan persentase 52,95% di Harian Kompas, dan 59,52% di Koran Sindo. Unsur-unsur yang tidak terdapat di Harian Kompas pada kategori relevansi ialah *timeliness*, *proximity*, dan *prominence*. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa Harian Kompas selalu mengangkat maupun menyajikan berita yang bersifat terbaru, atau terkini serta menyajikan berita yang selalu memiliki kedekatan unsur dengan pembaca, baik emosional maupun geografis, dan selalu mengangkat tema atau judul yang tenar “dikenal” oleh masyarakat. Kedekatan emosional tersebut seperti pada kasus Ahok yang menghina Al-Quran yang dianggap sebagai menista agama menjadi sorotan dan ketertarikan pembaca untuk mengetahui peristiwa tersebut, sehingga menarik minat pembaca untuk mengetahui peristiwa yang terjadi.

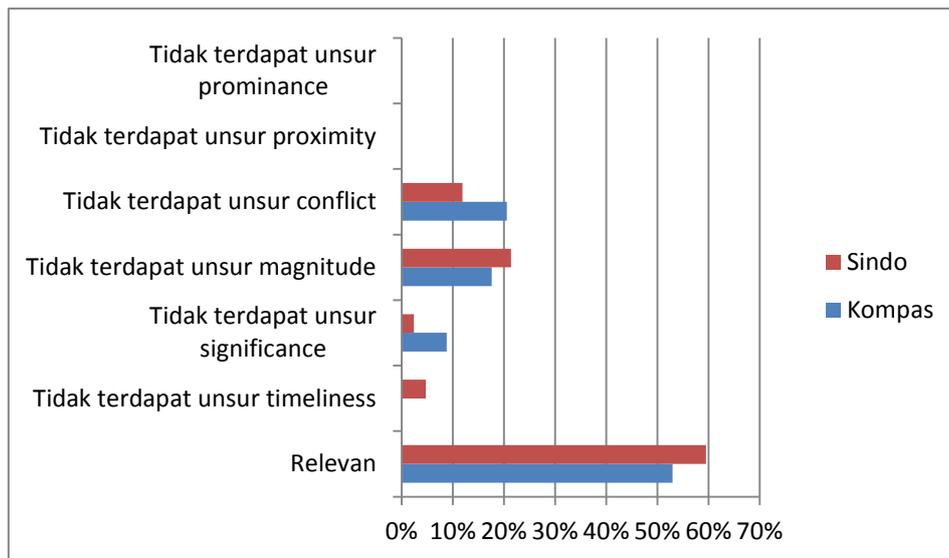
Berdasarkan analisis peneliti terhadap adanya unsur kedekatan emosional tersebut, membuat terkumpulnya umat muslim dari beberapa daerah yang ada di Indonesia bergerak untuk mendesak pemerintah agar menindaklanjuti kasus

tersebut yang dinilai menghina agama Islam pada kategori penistaan kitab suci dan menghina ulama. Kasus yang juga melibatkan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2016 lalu, menuntut polisi mengusut rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Dari kasus yang terjadi saat menjelang pilkada, membuat beberapa media meliput pemberitaan dan menyajikan pemberitaan tersebut ke masyarakat karena kasus tersebut memiliki nilai kedekatan kejadian dengan pembaca (*proximity*).

Meskipun terdapat unsur *timeliness*, *proximity* dan *prominence* di Harian Kompas, terdapat beberapa unsur yang tidak terdapat pada Harian Kompas. Unsur-unsur tersebut ialah *significance*, *magnitude*, dan *conflict*. Jumlah yang tidak terdapat unsur *significance* ialah 3 berita atau sama dengan 8,82%, yang tidak terdapat unsur *magnitude* berjumlah 6 berita atau sama dengan 17,64%, tidak terdapat unsur *conflict* berjumlah 7 berita atau sama dengan 20,59%. Jumlah unsur terbanyak yang tidak terdapat pada berita ialah “*conflict*” dengan jumlah 7 berita, tidak semua berita yang disajikan selalu mengandung unsur *conflict* pada berita yang disajikan, unsur selanjutnya yang tidak selalu terdapat pada berita Pilgub DKI Jakarta ialah *magnitude*, yaitu kejadian yang berkaitan dengan hal-hal besar atau seberapa luas pengaruh berita bagi khalayak. Setelah *magnitude*, unsur selanjutnya yang tidak selalu terdapat pada Harian Kompas untuk berita Pilgub DKI Jakarta 2016 ialah *significance*.

Pada Koran Sindo unsur yang selalu dimiliki oleh Koran Sindo mengenai berita Pilgub DKI Jakarta 2016 ialah unsur *proximity* yang artinya selalu menampilkan unsur yang memiliki kedekatan kejadian dengan pembaca, baik segi emosional maupun geografis. Unsur terbanyak yang tidak dimiliki oleh Koran

Sindo ialah *magnitude*, berjumlah 9 berita atau sebesar 21,42%, tidak terdapat unsur *conflict* 5 berita atau sebesar 11,90%, tidak terdapat unsur *timeliness* 2 berita atau sebesar 4,77%, dan 1 berita yang tidak memiliki unsur *significance* atau sebesar 2,39% dari keseluruhan total berita pada Koran Sindo yaitu 36 berita.



**Tabel 3.10**  
**Ilustrasi Persentase Relevansi**

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Koran Sindo lebih besar jika dibandingkan Harian Kompas, dengan persentase “Relevan” pada Koran Sindo yaitu 59,52% dan Harian Kompas sebesar 52,95%. Contoh berita yang memiliki unsur relevan pada kategori relevansi di Harian Kompas ialah berita pada tanggal 24 September 2016, dengan judul “Pilkada DKI Gambaran Pilpres”. Berita tersebut menjelaskan bahwa munculnya 3 poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus ke persiapan Pemilu Presiden 2019. Dengan demikian, semua berita mengandung unsur news value, sehingga semua berita dari 2 surat kabar dikatakan objektif.

Sedangkan pada Koran Sindo yang menunjukkan indikator relevansi ialah pada tanggal 19 September 2016, dengan judul berita “Penolakan Ahok Makin Meluas”. Berita tersebut menjelaskan bahwa penolakan terhadap Ahok untuk memimpin kembali ibu kota semakin meluas. Tokoh-tokoh dan masyarakat menggelar berbagai aksi tolak Ahok di beberapa lokasi kemarin. Selain itu, publik menilai Ahok tidak tegas menyikapi gedung-gedung liar di Jakarta, sehingga membuat masyarakat menilai Ahok hanya tajam ke orang miskin dan memihak kepada kelompok atas.



**Gambar 3.16**  
**Contoh Berita Relevan di Harian Kompas**



**Gambar 3.16**  
**Lanjutan Contoh Berita Relevan di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 7)**

**JAKARTA** – Penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memimpin kembali Ibu Kota semakin meluas. Tokoh-tokoh dan masyarakat menggelar berbagai aksi tolak Ahok di beberapa lokasi kemarin.

Yusril mengimbau warga Jakarta bersatu memunculkan satu pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI untuk menghadapi Ahok. Jika terjadi duaputaran, semua suara harus bersatu nantinya. "Dengan kebersamaan, pergantian rezim yang memerintah saat ini dengan rezim yang demokratis, sah, dan konstitusional dapat

lebih mudah," ujarnya kemarin. Hal senada juga disampaikan Amien Rais. Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota sangat berbahaya bila dipimpin oleh orang yang tidak peduli dengan rakyat kecil dan sombongnya setinggi langit, sehingga dengan dipilihnya pemimpin yang arogan dan tak berkepentingan maka masyarakat bisa menjadi korban. "Dia (Ahok) hanya berpihak pada konglomerat pemodal orang kecil dihinakan," katanya. Sesai menghadiri Forum RT/RW, Amien Rais, Yusril, dan tokoh lainnya mendatangi silaturahmi akbar dan doa bersama untuk kepemimpinan Jakarta di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi Nachrowi Ramli menuturkan, berkumpulnya semua elemen masyarakat untuk bersatu berjuang melawan Ahok. "Jakarta mestinya menang kalau tidak ada yang berkhianat," katanya.

Gambar 3.17  
Contoh Berita Relevan di Koran Sindo

Kepada pengurus RT/RW, dia meminta untuk menyosialisasikan ke warganya agar tak lagi memilih Ahok yang dinilai arogan. Apalagi selama ini Ahok

dianggap tak paham fungsi dari RT dan RW, termasuk soal serapan anggaran DKI yang masih rendah.

diyakini MPR dan akan

Selain di Jakarta Pusat, aksi penolakan Ahok juga terjadi di kawasan Kota Tua, Pinangisia, Taman Sari, Jakarta Barat, kemarin. Mereka berorasi menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Ahok yang dinilai arogansi dan emosional.

Mengenai relokasi warga korban pengusiran, Ratna menilai Ahok dan Pemprov DKI melakukan kebohongan. Pasalnya, rusunawa yang menjadi tempat relokasi tercatat tak aman. Ini terbukti dari kasus

yang menimpa Ilham, 4, di Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Ilham tewas diduga akibat kondisi rusun yang tak layak. "Rusun itu khusus untuk yang masih lajang, tapi kalau yang sudah berkeluarga jangan harap aman," ucapnya.

Menyikapi penolakan yang meluas, dalam sebuah kesempatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, penolakan itu adalah hak semua orang. "Itu hanya karena perbedaan konsep dan pemikiran, siapa pun boleh menolak," ujarnya.

Di sisi lain publik menilai Ahok tidak tegas menyikapi gedung-gedung liar di Jakarta. "Bisa dicek banyak sekali perumahan, gedung perkantoran, dan mal-mal di Jakarta yang melanggar aturan ruang terbuka hijau. Tapi Ahok nyaris tak bertaji menghadapi kelompok ini," ujarnya.

Gambar 3.17  
Lanjutan Contoh Berita Relevan di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 1)

# Terima Komputer, Netralitas KPU Bisa Terganggu

**JAKARTA** – Pemberian puluhan komputer ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dari perusahaan swasta bisa mengganggu netralitas lembaga tersebut. KPU sepatutnya menolak dan harus mengembalikan bantuan tersebut.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, ada dua analisis yang mencerminkan pemberian hibah itu. Pertama, waktu pemberian yang menjelang Pilkada DKI 2017 merupakan bahasa nonverbal yang berdampak tidak baik terhadap proses penghitungan suara. Seharusnya pemberian hibah dilakukan ketika KPU belum bekerja atau saat baru dilantik.

Kedua, pemberian berupa komputer. Dia menilai sistem komputer merupakan hal yang rentan di-*instal* program tertentu sehingga mengelompokkan data sesuai yang diinginkan pembuat program. Apalagi, pemberian komputer lengkap dengan *software*-nya. Berdasarkan dua analisis itu, seharusnya KPU DKI menolak pemberian komputer dari perusahaan swasta. Relasi seseorang tidak bisa dilihat dengan kasatmata," ucap Emrus kemarin.

Menurut dia, pemberian bantuan dari seseorang, perusahaan swasta, atau instansi pemerintah terhadap lembaga negara tidak ada yang salah. Terpenting waktu pemberian, bentuk barang, dan transparansi harus disesuaikan dengan kondisi. Artinya, meskipun hibah diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada KPU DKI saat menjelang pilkada, KPU harus menolaknya.

"Kita sudah rapatkan dan finalakan kita kembalikan seluruh komputer yang dipinjam-pakaikan."

**DAHLIAH UMAR**  
Komisioner KPU DKI Bidang Pencalonan dan Kampanye

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi menerima bantuan hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk KPU, lembaga tersebut menerima 46 unit komputer yang dipinjam-pakaikan. Atas pene-

rimaan komputer yang dipersoalkan ini, Komisioner KPU DKI Bidang Pencalonan dan Kampanye Dahliah Umar mengatakan, pihaknya akan mengembalikan puluhan komputer itu. Hal ini sebagai bentuk netralitas KPU DKI terkait banyak informasi negatif yang beredar. "Kita sudah rapatkan dan final akan kita kembalikan seluruh komputer yang dipinjam-pakaikan," ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mengapresiasi rencana pengembalian komputer ke Pemprov DKI. Namun, pihaknya berharap pengembalian tidak mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung. "Apalagi ini untuk menjaga netralitas," ucapnya.

Komisi A DPRD akan meminta penjelasan eksekutif terkait alokasi kewajiban pihak swasta untuk keperluan KPU. Hal ini agar sejumlah sarana prasarana maupun barang yang diberikan dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi KPU DKI hanya boleh menerima barang dari Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan semua hibah yang diberikan untuk KPU DKI maupun Bawaslu provinsi berasal dari Pemprov DKI. Dia juga mengakui hibah tersebut dari perusahaan swasta yang diserahkan kepada Pemprov DKI, kemudian diserahkan lagi kepada KPU DKI untuk pinjam pakai.

● bima setiyadi

## Gambar 3.18 Contoh Berita yang Tidak Terdapat Unsur *Timeliness* dan *Significance* di Koran Sindo

Contoh berita yang tidak memiliki unsur *timeliness* dan *significance* pada Koran Sindo di atas ialah berita yang menjelaskan tentang pemberian puluhan komputer ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang bisa mengganggu netralitas lembaga tersebut, dan hingga akhirnya KPU sudah memfinalkan akan mengembalikan seluruh komputer yang dipinjam-pakaikan, sehingga nantinya tidak mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung. Pada berita tersebut, tidak memiliki unsur *timeliness* karena tidak terdapat tanggal pada berita, sehingga tidak dapat diketahui apakah berita tersebut merupakan berita terbaru atau berita yang sudah lama. Selain itu, tidak terdapat unsur *significance* karena tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan pembaca.

Berita yang tidak memiliki unsur *significance* di Harian Kompas terdapat pada tanggal 27 September 2016, dengan judul berita yaitu "Demi Meraih

Kemenangan”. Berita tersebut menjelaskan mengenai konsultan politik yang memiliki peran penting dalam pemilihan kepala daerah. Selain membantu memenangkan calon kepala/wakil kepala daerah, hasil kerja mereka juga jadi parameter partai politik saat menentukan calon yang akan diusung di pilkada. Berita tersebut hanya membahas tentang pentingnya konsultan politik jika digunakan oleh para calon kandidat yang mengikuti pilkada, maka akan memperoleh keuntungan, konsultan politik hanya menjadi kepentingan bagi para calon kandidat, bukan khalayak, sehingga berita tersebut tidak memiliki unsur *significance*.

Hasil survei itu menjadi parameter utama dalam menentukan calon kepala/wakil kepala daerah yang akan diusung di suatu daerah. Semakin tinggi elektabilitas calon, kian tinggi pula peluangnya diusung Nasdem.

Bakal calon harus mengeluarkan uang sendiri untuk menggunakan jasa tersebut. Menurut Nining, hal itu sekaligus untuk menunjukkan keseriusan calon mengikuti pilkada.

Selain survei, konsultan politik ini menawarkan jasa lainnya di pilkada seperti strategi untuk menghadapi calon lainnya dan menghidupkan jaringan calon. Yunarto menolak menyebutkan biaya yang harus dikeluarkan calon jika menyewa paket lengkap, tidak sebatas survei. Namun, dengan melihat tarif sekali survei, sudah bisa terbaca besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk menggunakan jasa politik konsultan selama pilkada.

akan diusung. Selain itu, konsultan politik juga dinilai penting untuk menyajikan data pembandingan dari data yang disajikan tim sukses. Kehadiran konsultan juga dibutuhkan untuk memberikan panduan dalam penerapan strategi kampanye oleh tim sukses.

**Gambar 3.19**  
**Contoh Berita yang Tidak Terdapat Unsur *Significance* di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 12)**

PILKADA

## Koalisi Bahas Dua Kemungkinan

JAKARTA, KOMPAS — Hari pertama pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, Rabu (21/9), sejumlah bakal calon sudah mendaftar. Namun, sejumlah partai politik juga masih membahas bakal calon yang akan diusung.

Pembahasan bakal calon yang akan diusung ini, semalam, antara lain dilakukan oleh sebagian parpol yang tergabung dalam

Empat Pasangan Mendaftar

HAL 26

Koalisi Kekeluargaan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang digelar untuk membahas calon yang diusung di Pilkada DKI Jakarta ini dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy.

Dua anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya, yaitu Partai

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, Koalisi Kekeluargaan akan mencari pasangan terkuat untuk melawan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung koalisi PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, serta Hanura dan kemarin telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Menurut Arsul, ada dua opsi yang muncul di Koalisi Kekeluargaan, yaitu memasang satu pasang calon atau mengusung dua pasang calon. Dua pasang calon itu dimaksudkan untuk memecah suara dengan skenario pilkada berlangsung dua putaran.

Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Almuzammil Yusuf mengatakan, untuk mengalahkan petahana, Koalisi Kekeluargaan membahas kemungkinan membuka koalisi yang besar pada putaran kedua.

### Gambar 3.20

**Contoh Berita yang Tidak Terdapat Unsur *Magnitude* di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 4)**

Berita di atas merupakan contoh berita yang tidak memiliki unsur *magnitude*. Berita pada tanggal 22 September 2016 di Harian Kompas, dengan judul berita yaitu “Koalisi Bahas Dua Kemungkinan”. Berita yang berjudul “Koalisi Bahas Dua Kemungkinan” tidak memiliki unsur *magnitude* karena kejadian yang diinformasikan bukan berkaitan dengan hal-hal yang besar dan tidak terlalu luas pengaruhnya bagi khalayak. Berita tersebut hanya menjelaskan tentang koalisi kekeluargaan memasang satu pasang calon atau mengusung dua pasang calon. Dua pasang calon itu dimaksudkan untuk memecah suara dengan skenario pilkada berlangsung selama dua putaran.

Selain tidak terdapat pada Harian Kompas, unsur *magnitude* juga tidak terdapat pada Koran Sindo. Contoh berita yang tidak memiliki unsur *magnitude* di Koran Sindo ialah berita yang berjudul “Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017”. Berita pada tanggal 10 Oktober tersebut membahas tentang kesiapan Perindo

mengawal Pilkada DKI 2017 mengimbau warga tidak ikut terjebak dalam isu sara. Bagi Perindo adanya kesiapan tersebut dengan mengawal demokrasi agar Jakarta mendapat pemimpin yang membawa perubahan lebih baik bagi warga kecil,” ujar Ketua DPP Perindo Jakarta Utara. Dari informasi yang disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa berita dengan judul “Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017” tidak memiliki unsur *magnitude*, yang artinya berkaitan dengan hal-hal besar secara kuantitatif yang memiliki pengaruh sangat luas bagi khalayak.

Berikut merupakan contoh kategori relevansi yang tidak memiliki unsur *magnitude* di Koran Sindo, dan beberapa unsur lainnya yang tidak dimiliki oleh Harian Kompas dan Koran Sindo, diantaranya ialah:

**JAKARTA** – DPD Partai Perindo Jakarta Utara merayakan ulang tahun Perindo yang ke-2 di kantor DPD Perindo Jakarta Utara, Jalan Pelepah Asri Satu, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin. Seluruh kader Perindo berkomitmen terus berjuang bersama warga.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Perindo Jakarta Utara Timotius Yonathan meminta 2.000 kadernya dapat sukseskan Pilkada DKI Jakarta 2017 meski Perindo tidak masuk dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Terpenting Jakarta 2017 mendapatkan pemimpin yang santun, tidak arogan, tegas, dan berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan tertentu.

Kami siap mengawal demokrasi agar Jakarta mendapatkan pemimpin yang membawa perubahan lebih baik bagi warga kecil,” ujar Timotius kemarin.

Menurut dia, wilayah Jakarta Utara merupakan daerah rawan Pilkada DKI lantaran banyak penolakan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akibat kebijakan-kebijakannya baik pengusuran maupun reklamasi. Meski demi-

gang. “Jadi, program bantuan gerobak Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah,” kata Wasekjen DPP Perindo Bidang UMKM dan Koperasi Henky Eko Sriyanto kemarin.

**Gambar 3.21**  
**Contoh Berita yang Tidak Terdapat Unsur *Magnitude* di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 22)**

Pemeriksaan bebas narkoba pada ketiga pasangan kandidat dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Minggu (25/9).

Kepala BNN Provinsi DKI Wahyu Adi mengatakan, rambut perlu diambil untuk tes narkoba karena rambut bisa menyimpan jejak penggunaan zat terlarang hingga enam bulan ke belakang. Sementara darah ataupun urine hanya menyimpan jejak penggunaan zat terlarang dalam hitungan hari.

Selain uji bebas narkoba, ketiga pasangan calon juga menjalani tes psikologi di RSAL Minthardjo. Sehari sebelumnya, mereka mengikuti tes kesehatan yang juga diadakan di RSAL.

Dalam tes psikologi yang berlangsung sekitar tiga jam, setiap calon menjalani tes tertulis dan wawancara.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, proses verifikasi calon melalui tes kesehatan, tes psikologi, dan uji bebas narkoba sudah selesai. Hasil verifikasi secara keseluruhan akan diumumkan pada 29 September.

Gambar 3.22

Contoh Berita yang Tidak Terdapat Unsur *Conflict* di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No.

11)

# KPU Hanya Andalkan Tes Urine

Deteksi Penyalahgunaan Narkoba oleh Calon Kepala Daerah

**JAKARTA** – Tes penyalahgunaan narkoba dengan memeriksa rambut calon kepala daerah urung dilakukan di semua daerah yang menggelar pilkada. Hanya daerah tertentu yang melaksanakan tes rambut ini, salah satunya DKI Jakarta.

Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tes rambut awalnya memang ingin diterapkan, tetapi ditemukan beberapa kendala di daerah sehingga urung dilaksanakan. *Pertama*, masalah kesiapan anggaran. Dibutuhkan anggaran yang lebih besar jika pengujian rambut dilakukan karena memiliki kerumitan tersendiri. *Kedua*, soal waktu yang terbatas. Pemeriksaan kesehatan kandidat hanya tiga hari, padahal untuk mendapatkan hasil tes rambut butuh waktu lebih lama.

Karena kesiapan daerah berbeda-beda, akhirnya rata-rata KPU tidak melakukan tes rambut ini," ujar Arief saat dihubungi di Jakarta kemarin. Pemeriksaan kesehatan, termasuk tes narkoba terhadap calon, sudah dilakukan KPU di sejumlah daerah sejak kemarin.

Sejumlah KPU daerah sejak kemarin bahkan sudah mengirimkan sejumlah sampel urine ke Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta. Pada pilkada kali ini, pemeriksaan kesehatan calon tidak hanya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), melainkan juga BNN di setiap daerah (BNN Provinsi).

Wacana menerapkan tes rambut sempat mengemuka menyusul kasus penangkapan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi dalam kasus narkoba pada Maret 2016. Bupati ini diketahui mengonsumsi sabu-sabu beberapa waktu setelah dia dilantik sebagai bupati. Kasus ini memunculkan pertanyaan terhadap metode tes narkoba yang dilaku-

kan KPU karena saat tes kesehatan Nofiadi, dia tidak terdeteksi menggunakan narkoba.

Ketua Biro Hukum dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Nizar BM mengatakan, pemeriksaan urine memang hanya bersifat jangka pendek, yakni keberadaan narkoba ditubuh seseorang hanya terdeteksi selama 34 jam.

"Untuk tahu seseorang memakai narkoba lebih dari 34 jam sebelum pemeriksaan, tes rambut memang lebih efektif," ujarnya saat dihubungi kemarin.

**"Karena kesiapan daerah berbeda-beda, akhirnya rata-rata KPU tidak melakukan tes rambut ini."**

**ARIEF BUDIMAN**  
Komisiner KPU

Namun dia menilai pengujian narkoba pada pilkada kali ini akan lebih komprehensif karena KPU sudah melibatkan BNN. Diakui, dulu jika ada seorang calon yang dicurigai sebagai penyalah guna, IDI juga tetap mengirimkan urinenya ke laboratorium untuk ditindaklanjuti.

Nizar mengatakan, pemeriksaan kesehatan calon oleh IDI dilakukan berdasarkan standar yang disepakati dengan KPU. Artinya, IDI hanya melak-

sanakan apa yang diminta KPU.

Disisi lain, Nizar menyayangkan jika KPU beralasan bahwa tes rambut tidak dilakukan hanya karena masalah anggaran, sebab uji narkoba ini hanyalah bagian kecil dari pemeriksaan kesehatan bakal calon. "Begitu juga alasan waktu yang lama. IDI bisa saja merekomendasikan bahwa seorang calon lolos kesehatan, tetapi hasil tes narkoba akan menyusul nanti," ujarnya.

Sementara itu, BNN telah menerima sampel urine pasangan calon peserta pilkada dari sejumlah daerah kemarin. Sudah ada empat BNN daerah yang menerima sampel urine calon, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Banten, dan Kalimantan Selatan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN Kombes Pol Slamet Pribadi mengatakan, pelibatan BNN pada tes kesehatan calon berangkat dari maraknya kasus narkoba yang melibatkan pejabat tinggi daerah. "KPU selaku ujung tombak pelaksanaan pilkada serius menanggapi masukan beberapa pihak agar melibatkan BNN dalam proses pilkada," katanya kemarin.

KPU maupun BNN, kata dia, sepakat untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba selama pelaksanaan pilkada.

Khusus untuk calon kepala daerah DKI Jakarta, tes narkoba akan dilakukan di Gedung BNN, kawasan Cawang, Jakarta Timur, pagi ini pukul 08.00 WIB.

"Kami sediakan waktu mulai pukul 08.00 di Laboratorium BNN. Tes meliputi urine dan rambut," kata Slamet.

Berbeda dengan daerah lain, pemeriksaan rambut dilakukan terhadap calon kepala daerah di DKI karena peralatan BNN pusat memungkinkan untuk itu.

"Dengan tes urine sebenarnya cukup, tetapi rambut ini untuk lebih meyakinkan saja. Diupayakan hasilnya bisa keluar dalam 24 jam," tandasnya.

• bakti m munir/ant

Gambar 3.23

Contoh Berita yang Tidak Terdapat Unsur *Conflict* di Koran Sindo

Berita yang tidak memiliki unsur *conflict* di atas terdapat pada Harian Kompas dan Koran Sindo, dengan jumlah berita di Harian Kompas yaitu 7 berita dan Koran Sindo 5 berita. Pada Harian Kompas, berita yang tidak memiliki unsur *conflict* ialah pada tanggal 26 September 2016, judul berita tersebut ialah “BNN Telusuri Jejak Narkoba”. Berita di Harian Kompas menginformasikan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menelusuri kemungkinan penggunaan narkoba dalam kurun enam bulan terakhir pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur DKI 2017-2022. Calon yang tersandung masalah narkoba bisa diganti dengan nama lain. Dari informasi yang disampaikan melalui Harian Kompas, tidak ditemukan adanya unsur *conflict*, karena informasi yang disampaikan hanyalah pemeriksaan masing-masing pasangan calon ke BNN untuk mengikuti rangkaian tes yang telah diberlakukan oleh pihak pemilukada.

Berita yang tidak terdapat unsur *conflict* pada Koran Sindo terdapat pada berita tanggal 25 September 2016, dengan judul berita yaitu “KPU Hanya Andalkan Tes Urine”. Informasi yang disampaikan pada berita tersebut menjelaskan tentang pemeriksaan rambut calon kepala daerah urung dilakukan di semua daerah yang menggelar pilkada. Hanya daerah tertentu saja yang melaksanakan tes rambut ini, salah satunya DKI Jakarta. Pemeriksaan tersebut tidak diberlakukan di beberapa daerah karena kesiapan daerahnya yang berbeda-beda, sehingga akhirnya KPU tidak melakukan tes rambut ini yang dilakukan oleh cagub-cawagub DKI Jakarta. Dari berita yang telah disajikan, tidak ditemukannya adanya unsur *conflict* pada berita yang berjudul “KPU Hanya Andalkan Tes Urine”.

## 6. Hasil Analisis Berdasarkan Kategori Tipe Liputan

Sebuah berita memiliki tipe liputan yang akan disampaikan pada khalayak. Terdapat 3 tipe liputan berdasarkan sisi yang ditampilkan pada berita. Tipe liputan tersebut ialah satu sisi, dua sisi, dan multi sisi. Satu sisi artinya berita yang ditampilkan hanya berisi dari 1 sumber saja. Misalnya, hanya dimunculkan pendapat dari Ahok-Djarot saja. Dua sisi artinya berisi 2 pandangan 2 informasi yang berlainan dari kedua pihak. Misalnya, disajikan pandangan dari pihak Ahok-Djarot dan Agus-Sylviana. Multi sisi artinya berisi banyak sudut pandang yang diberikan oleh sumber berita, sehingga objektivitas tetap terjaga. Misalnya disuguhkan pendapat pihak lain seperti pengamat politik atau pendukung dari partai mengenai masing-masing paslon.

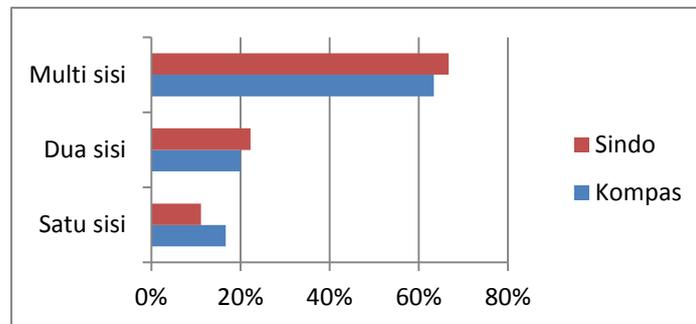
Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Satu sisi	III	5	16,66%	III	4	11,11%
Dua sisi	III I	6	20%	III III	8	22,22%
Multi sisi	III III III III	19	63,34%	III III III III III	24	66,67%
<b>Total Keseluruhan</b>		30	100%	<b>Total</b>	36	100%

**Tabel 3.11 Hasil Analisis Tipe Liputan**  
Sumber: Data Coding 2016

Analisis berdasarkan hasil *coding sheet* mengenai tipe liputan berita Pilgub DKI Jakarta selama bulan September hingga Oktober 2016 pada Harian Kompas didapatkan hasil sebesar 16,66% atau sebanyak 5 berita untuk berita dengan satu sisi. Kemudian untuk berita dua sisi didapatkan hasil sebesar 20% atau sebanyak 6 berita. Berita terbanyak berasal dari berita yang multi sisi, yaitu sebesar 63,34% atau sebanyak 19 berita dari total 30 berita.

Sedangkan pada Koran Sindo, untuk berita dengan satu sisi berjumlah 11,11% atau sebanyak 4 berita. Kemudian berita dengan dua sisi diperoleh hasil

sebesar 22,22% atau sebanyak 8 berita, dan hasil terbanyak yang dimiliki oleh Koran Sindo pada kategori tipe liputan ialah multi sisi yaitu 66,67% atau sebanyak 24 berita.



**Tabel 3.12**  
**Ilustrasi Persentase Tipe Liputan**

Kedua media cetak baik Harian Kompas maupun Koran Sindo memiliki berita yang cukup tinggi pada tipe multi sisi. Keduanya masih menjaga objektivitas yang menampilkan bukan hanya sisi 1 kandidat atau 2 kandidat, akan tetapi masing-masing kandidat dan partai pendukung maupun partai politiknya. Media yang hanya menampilkan satu sisi saja justru mengangkat *figure* yang diberitakan hanya dengan mengumpulkan informasi dari 1 narasumber saja seperti dari perseorangan, data dari lembaga survei, maupun yang lainnya.

Contoh berita 1 sisi yang terdapat pada Harian Kompas ialah 5 Oktober 2016, berita tersebut berjudul “Survei LSI: Elektabilitas Petahana Menurun”. Berita tersebut hanya menampilkan satu sisi saja yang memberitakan elektabilitas Ahok menurun yaitu bersumber dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), menurunnya elektabilitas Ahok menyusul munculnya calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Rasyid Baswedan. Tidak terdapat narasumber lainnya pada berita tersebut, sehingga hanya memunculkan satu sisi saja.

Selain berita 1 sisi yang juga terdapat pada Harian Kompas, berita 2 sisi juga terdapat pada Harian Kompas. Berita tersebut terdapat pada tanggal 3 Oktober 2016, dengan judul “Modal Kampanye Andalkan Partisipasi”. Berita yang menampilkan dua sisi yang diberitakan, diantaranya ialah juru bicara teman Ahok dan Keua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan aktivitas teman Ahok berubah dari relawan pengumpul KTP menjadi relawan pemenangan Ahok-Djarot. Selain itu, ditampilkannya sisi lainnya yaitu dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli mengatakan, tim pemenangan Agus-Sylvi belum resmi terbentuk, anggota tim tidak dipilih menurut perolehan kursi, ada banyak tokoh yang terlibat termasuk nonpartai.



**Gambar 3.24**  
**Contoh Berita 1 Sisi di Harian Kompas**



**Gambar 3.25**  
**Contoh Berita 2 Sisi di Harian Kompas**



**Gambar 3.26**  
**Contoh Berita Multi Sisi di Harian Kompas**

Berita yang multi sisi ialah berita yang menampilkan banyak sudut pandang dari sumber berita. Berita multi sisi pada Harian Kompas terdapat pada tanggal 13 Oktober 2016, judul beritanya ialah “Relawan Pendukung Minta Basuki Perbaiki Komunikasi”. Dari berita yang disampaikan, ketiga pendukung paslon memiliki kekuatan masing-masing, seperti relawan Ahok-Djarot menganggap program pasangan petahana sangat berdampak di masyarakat. Selain Ahok, Anies juga diberitakan pada berita tersebut. Anies mengingatkan warga bahwa Pilkada DKI tidak hanya untuk memilih sosok calon yang disukai, tetapi juga menentukan Jakarta 5 tahun ke depan. Di sisi lainnya, Agus mengaku akan menampung keluhan dan harapan warga terkait biaya sewa, tunggakan, ataupun fasilitas sosial yang ada. Informasi mengenai ketiga pasangan calon tersebut, dari masing-masing sisi termasuk pada kategori multi sisi.

Berita yang memiliki tipe liputan 1 sisi di Koran Sindo ialah berita pada tanggal 10 Oktober 2016. Berita yang berjudul “Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017” menunjukkan bahwa berita tersebut hanya menjelaskan sisi dari partai Perindo yang ikut serta untuk mengawal Pilkada DKI 2017. Partai Perindo juga mengimbau masyarakat tidak ikut terjebak dalam isu sara dalam Pilkada DKI 2017, sehingga tidak menunjukkan narasumber lain yang bersebrangan dengan Perindo. Tipe liputan 2 sisi pada Koran Sindo ialah berita dengan judul “Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik”. Berita pada tanggal 22 September 2016 tersebut menjelaskan munculnya konflik di DKI akibat kepemimpinan Ahok yang tidak mau mendengarkan warga. Pembangunan yang dilakukan Ahok juga tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun dari musrembang tingkat RW, lurah hingga provinsi, kemudian diusulkan dalam APBD. Sementara itu, Ahok sendiri membantah bahwa semua kebijakan dari pembangunan yang dilakukannya diluar perencanaan. Semua pembangunan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga” ujarnya. Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa sisi yang ditampilkan dari 2 narasumber yang berbeda menunjukkan pada kategori “dua sisi”.

Tipe liputan multi sisi pada Koran Sindo terdapat pada berita tanggal 25 September 2016. Berita yang berjudul “Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi” merupakan tipe liputan yang multi sisi. Dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa narumber yang memberikan keterangan terhadap kondisi ibukota yang membutuhkan pemimpin manusiawi. Diantaranya ialah pandangan terhadap pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Sarwangi Chaniago dan sejawaran Betawi JJ Rizal yang mengatakan Jakarta bukan hanya butuh orientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga bisa menyentuh manusia di dalamnya. Sementara

itu, tim pemenang tiap pasangan menggugulkan pasangan dari calon kandidat masing-masing, dengan sisi yang berbeda-beda.



Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Timotius Yonathan (kanan) menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPW DKI Jakarta Partai Perindo Sahrianta Tarigan saat perayaan HUT Ke-2 Partai Perindo di Kantor DPD Partai Perindo Jakarta Utara kemarin (foto atas). Kader Perindo melakukan pembinaan terhadap pedagang mi ayam di Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, kemarin (foto bawah).

## Perindo Siap Kawal Pilkada DKI 2017

**JAKARTA** - DPD Partai Perindo Jakarta Utara merayakan ulang tahun Perindo yang ke-2 di kantor DPD Perindo Jakarta Utara, Jalan Pelepah Asri Satu, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin. Seluruh kader Perindo berkomitmen terus berjuang bersama warga.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Perindo Jakarta Utara Timotius Yonathan meminta 2.000 kadernya dapat menyaksikan Pilkada DKI Jakarta 2017 meski Perindo tidak masuk dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Terpenting Jakarta 2017 mendapatkan pemimpin yang santun, tidak arogan, tegas, dan berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan tertentu.

"Kami mengimbau warga tidak ikut terjebak dalam isu sara dalam Pilkada DKI 2017. Kami siap mengawal demokrasi agar Jakarta mendapatkan pemimpin yang membawa perubahan lebih baik bagi warga kecil," ujar Timotius kemarin.

Menurut dia, wilayah Jakarta Utara merupakan daerah rawan Pilkada DKI lantaran banyak penolakan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akibat kebijakan-kebijakannya baik pengurusan maupun reklamasi. Meski demikian, kader Perindo tidak akan memaksa warga untuk memilih siapa pun kandidatnya. Dia hanya berpesan agar pada proses Pilkada DKI, warga di Jakarta Utara tidak ada gesekan.

Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Sahrianta Tarigan mengimbau konstituen Perindo jangan terpecah dalam Pilkada DKI 2017. Perindo siap mengawal demokratisasi agar mendapatkan pemimpin yang terbaik.

Dilokalisasi, Bidang UMMK dan Koperasi DPP Partai Perindo melakukan pembinaan terhadap puluhan pedagang kecil dan menengah di wilayah DKI Jakarta. Pembinaan tersebut berupa pengecekan kondisi ge-



robak, omzet, kualitas barang dagangan yang dijual, serta tukar pendapat dengan para pedagang. "Jadi, program bantuan gerak Perindo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah," kata Wasekjen DPP Perindo Bidang UMMK dan Koperasi Henky Eko Sriyanto kemarin.

Dia menargetkan akan ada 1.000 unit gerobak yang akan diserahkan kepada para pedagang di Jakarta. Para pedagang diajar-

kan bagaimana manajemen yang baik, menyajikan hidangan yang higienis, etika penyajian maupun cara mengemas.

Sementara itu, DPW Partai Perindo Banten menggelar acara syukuran HUT ke-2 Partai Perindo di kantor DPW Perindo Banten, Kota Serang, kemarin. Dalam syukuran ini, kader memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu dari fakir miskin.

● **bima setyadi/helmi syarif/teguh mahardika**

## Gambar 3.27

### Contoh Berita Satu Sisi di Koran Sindo

# Kebijakan Ahok Dinilai Timbulkan Konflik

**JAKARTA** - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak terencana dengan matang sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Gubernur juga minim melibatkan partisipasi publik.

Menurut Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, sejak memimpin Ibu Kota Ahok tidak pernah menggunakan kebijakan publik. Tidak mengherankan bila setiap kebijakan yang dikeluarkan kerap memunculkan persoalan, padahal Pemprov DKI memiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berwenang menjangkau aspirasi warga sebagai masukan gubernur. "Segala kebijakan harus matang. Publik harus dilibatkan. Tanpa partisipasi publik,

kebijakan hanya popularitas semata," ujar Trubus kemarin.

Menurut dia, kebijakan publik memang membutuhkan waktu agar semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Maka itu, dahulu ada yang namanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repletta). Artinya regulator tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil sebuah kebijakan yang keluar dari rencana.

"Setiap pengurusan selalu terjadi masalah. Apa salahnya meniru gaya Joko Widodo yang selalu turun ke lapangan untuk

menyelesaikan masalah. Karakteristik Ahok terlalu elite. Bukan pro rakyat. Ingat fondasinya dari bawah," ungkapnya.

Karena itu, apabila Ahok dijatohkan kembali memimpin Jakarta seutasi diusung PDIP, dia menyarankan pasangan ini dapat berpihak kepada masyarakat kecil bukan pada pengusaha. "Jangan berpikiran kalau ketemu warga takut diani. Masak pemimpin takut sama yang dipimpinnya. Kalau ketemu pengusaha bisa sebulan sekali. Belum lagi terungkapnya Sunny dalam dugaan suap reklamasi dan tidak konsistennya pernyataan Ahok. Jadi kebijakan yang dibuat Ahok banyak dipengaruhi pengusaha, bukan rakyat kecil," papar Trubus.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono juga sepakat dengan Trubus. Dia menilai munculnya konflik di DKI akibat kepemimpinan

*"Jangan berpikiran kalau ketemu warga takut diani. Masak pemimpin takut sama yang dipimpinnya. Kalau ketemu pengusaha bisa sebulan sekali."*

**TRUBUS RAHARDIANSYAH**  
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Ahok yang tidak mau mendelegasikan aspirasi warga. Dalam mewujudkan visi misi yang merupakan joni kepala daerah terhadap warganya saat meminta dukungan, Ahok seharusnya membangun suasana kondusif

dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak saling dukung seperti yang terlihat saat ini.

Misalnya dalam penanganan banjir yang menjadi prioritas dalam visi misi Jakarta Baru. Seharusnya bila Jakarta masih banjir, Ahok tidak menyalahkan kriteria anak buahnya. Sebaliknya Ahok menunjukkan empatinya kepada warga terdampak banjir, menunjukkan rasa prihatin, bahkan kalau perlu blusukan ke lokasi banjir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lung) mengatakan, pembangunan yang dilakukan Ahok selama ini tidak sesuai perencanaan yang disusun dari unsur tingkat RW, lurah hingga provinsi, kemudian diuskan dalam APBD ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Misal-

nya dalam penertiban Kaledio dan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Seharusnya apabila sesuai perencanaan, warga tidak akan menjadi korban pengurusan dan tentunya kehidupannya menjadi lebih layak.

Kemudian pembangunan jalan layang. Semangi yang menggunakan biaya dari koefisien lantai bangunan (KLB) dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana corporate social responsibility (CSR). Jika dilihat dari sisi kebutuhan warga, jalan layang Semangi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan roda empat. Sementara Pemprov DKI memperbaiki dan menambah moda transportasi massal.

"RPTRA itu bisa dibangun menggunakan APBD. Kenapa malah pakai CSR? Kalau tidak bisa menggunakan APBD setidaknya bisa CSR atau KLB di-

gunakan untuk membangun kegiatan prioritas yang direncanakan," ujarnya.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bahwa semua kebijakan dan pembangunan yang dilakukannya di luar perencanaan. Semua pembangunan untuk memenuhi kebutuhan warga. Misalnya pembangunan RPTRA adalah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan, warga dapat menikmati dengan berkumpul di RPTRA, termasuk untuk fasilitas bermain anak-anak, sekaligus melakukan kegiatan apam.

Kami terus berupaya menjadikan Jakarta lebih baik untuk warga Jakarta. Kalau tidak proyek proyek saya kasih runtu-runtu, Kartu Jakarta Pintar, bus gratis, dan sebagainya, ucapannya Bupati Belitung Timur itu.

● **bima setyadi**

## Gambar 3.28

### Contoh Berita Dua Sisi di Koran Sindo

# Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi

**JAKARTA** – Kota Jakarta bukan hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki orientasi pada pembangunan fisik saja, tetapi juga yang bisa menyentuh manusia di dalamnya. Selain itu pembangunan jangan hanya diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi masyarakat seutuhnya.

Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik dari Vospol Center Fani Syarif Chaniago dan sejarawan Betawi JJ Rizal untuk merespons dinamika Pilkada DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, kepemimpinan yang diharapkan tersebut tidak tercermin da-

lam pemerintahan saat ini. Seperti di Pilkada, Pilkada 2017 nanti pasangan petahana yang diusung PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura, yakni Basuki Tjahaja Purnama/Ahok-Djarot Saiful Hidayat, akan berhadapan dengan

Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dijanjikan Partai Gerindra dan PKS serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dari kubu Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP. "Bicara DKI bukan hanya soal pembangunan yang notabene adalah jembatan, mal, apartemen, waduk, dan seterusnya, tetapi tidak pernah memikirkan manusia di dalamnya, yaitu melakukan upaya bagaimana manusia dimanusiakan agar bisa sejahtera, bisa diatur, agar yang tadi tidak terburu-buru menjadi terburu, yang tidak teratur menjadi teratur, yang tidak indah menjadi indah," ujar Panggi, tali malan.

Menurut dia, pemimpin Jakarta perlu memikirkan dan membentuk gagasan bagaimana orang yang tinggal di kotanya bisa bahagia dan senang. Orang dimak-sud termasuk kalangan masyarakat miskin. Dalam pandangannya, kelompok ini harus diperhatikan, bukan digusur. "Seolah-olah orang miskin sudah tidak pantas hidup di Jakarta saat ini, bagai-mana kemudian logikanya upaya peng-gusuran digerakkan dan opini yang diban-gun dalam rangka tata kota agar lebih hijau, tetapi realitasnya apartemen yang dibangun di daerah tersebut, belum lagi proyek reklamasi yang begitu hebatnya.

Ini realitas yang terjadi," ungkapnya. JJ Rizal menilai Jakarta masih ba-yak yang perlu dibenahi dari berbagai sisi. Namun, sejauh ini, cita-cita Jakarta untuk menjadi kota rakyat tidak pernah jadi kenyataan karena pembangunan dikendalikan untuk sekelompok orang dan untuk kepentingan mereka, bukan masyarakat luas.

(Ke Hal 15)

Silakan komentari headline ini di @MNCN KoranSindo dengan hashtag #PilkadaDKI2017

## Jakarta Butuh Pemimpin Manusiawi

((dari Hal 1  
"Saat ini kota dikendalikan oligarki dan konglomerasi kota yang dalam pembangunan hanya untuk memenuhi aristo-krasi politik," paparnya.

Karena itu, dia pun meng-imbau masyarakat mengguna-kan kesempatan untuk memilih calon yang berani bertindak agar pembiasaan terhadap cita-cita berkeadilan bisa diambil dari ke-luasan konglomerasi. "Kita tidak diperluhupemimpin yang punya kesantunan, yang diperlukan justru pemimpin yang punya etika menyangkut moral dan ni-lai hukum, apakah menghorma-ti putusan pemerintah, hukum, dan keadilan," ungkapnya.

Sementara itu tim pemenang tiap pasangan kandidat meyakini jagoannya bisa dite-rima masyarakat Jakarta. Tim pemenangan Ahok-Djarot, Taufik Basari, menilai pasangan yang diusung yaitu telah mewakili apa yang masyarakat Jakarta inginkan. "Kita butuh calon pemimpin yang cerdas. Cerdas dalam arti punya konsep visi-gagasan, jangan hanya bicara tapi juga bagaimana konsepnya dan dijalankan," ungkapnya. Syarif dari tim pemenang-

an Anies-Sandiaga juga me-ngatakan pasangan yang mere-ka usung cocok untuk kebutuh-an warga Jakarta. Menurut dia, Anies dan Sandiaga punya kom-petensi dan karakter yang ham-pir sempurna. Keduanya saling melengkapi dan sudah saling kenal. "Anies-Sandi adalah ke-hadiran pimpinan baru, punya bentuk leadership yang tangguh sebagai kunci memimpin Jakar-ta. Dia konsep yang ditawarkan Anies dan Sandi, pertama pe-ngendalian harga kebutuhan pokok dan (kedua) menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Adapun dari tim pemenang-an Agus-Sylviana. Didi Irawadi Syamsudin, meyakini pas-an yang diusungnya dapat merekatkan rakyat seluruh Ja-karta yang warganya terdiri atas beragam suku. Dalam pandang-annya, pemimpin Jakarta yang ideal adalah pemimpin yang bisa merangkul rakyatnya, bukan hanya fokus pada pembangun-an yang menguntungkan. "Bu-kan hanya wajah Jakarta indah, tetapi sejahtera dan kebijakan adil. Relokasi jangannya sampai-masyarakat merasa tersingkir dan terbuang. Saya sepakat Jakarta menjadi kota budaya dengan

meningkatkan taraf pendidikan masyarakatnya.

### Foto Bareng-Bareng

Suhu politik di Pilkada DKI Jakarta yang sempat memanasi beberapa hari belakangan, ke-marin sempat mereda. Hal ini terkait dengan swafoto besama atau wafie yang dilakukan tiga pasang kandidat yang bakal bertarung, yakni pasangan Ahok-Djarot, Agus Yudhoyono-Sylviana, dan Anies-Sandiaga, di sela tes kesehatan yang mereka lakukan di RSAL Mintoharjo Jakarta.

Foto wafie tersebut diung-gah Anies dalam akun Insta-gram-nya. Tidak ada sama se-kali terpancang keterangan di antara enam orang tersebut, apalagi suasana permusuhan. Sebaliknya mereka tersenyum berbarengan dan menunjuk-kan kekompan.

"Swafoto menjelang pe-meriksaan kesehatan," tulis Anies dalam akun Instagram-nya ke-marin. Postingan ini kemudian menyebar luas dan sempat menjadi trending topic.

Agus Yudhoyono meng-apresiasi foto bareng tersebut. Dia pun menunjukkan kegem-

birannya. "Kita seru banget, kita kompak kita happy-happy, tadi selfie juga berenam. Sama-sama, pastikusakselfiedeh," kata Agus.

Ahok pun mengakui para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur melaku-kan wafie. Bahkan Ahok meng-akumen-twit fotot tersebut. Ha-nya saja, selain bercanda, ti-dak ada persoalan serius yang mereka bicarakan, terlebih soal kontestasi pilkada. "Gak ada yang serius," ujar Ahok.

Sementara itu, tes kesehat-an yang dilakukan di RSAL Mintoharjo merupakan bagi-an dari prosedur yang harus di-penuhi untuk bisa ikut pilkada. Tes kesehatan melibatkan 71 dokter, tetapi hal itu tidak termasuk tes narkoba dan psiko-tes, karena kedua tes tersebut akan dilakukan di tempat ter-pisah, yakni di Kantor BNN Jakarta Timur.

Tes kesehatan sesuai jadwal dilakukan pada 07.00-17.00 WIB. Penjagaan ketat oleh an-ggota TNIAD dilakukan di STer-sebut. Dari pantauan KORAN SINDO, pasangan petahana, Ahok-Djarot, menjadi yang per-tama datang. Selang beberapa

menit setelahnya, Ahok datang. Seusai mendaftar, melalui lobiutama, Ahok-Djarot kemud-ian berfoto bersama dihadap-an wartawan. Menghadapi tes ini, keduanya mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

Ahok bahkan sempat berdirinya sejak awal telah siap mengha-dapi tes kesehatan. "Paling ha-nya puasa mulut saja," ucap Ahok singkat sebelum melaku-kan serangkaian tes.

Pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana datang kemudian. Khusus kedatangan Agus sem-pat membuat heboh sejumlah awak media. Fasalnya, diban-dingkan dengan pasangan lain-nya, termasuk Anies Baswe-dan-Sandiaga Salahudin Uno yang lebih santai, pakaian yang digunakan Agus lebih sedikit rapi. Dia mengenakan kaca mata hitam, kemeja batik me-pisah, yakni di Kantor BNN Jakarta Timur.

Tes kesehatan sesuai jadwal dilakukan pada 07.00-17.00 WIB. Penjagaan ketat oleh an-ggota TNIAD dilakukan di STer-sebut. Dari pantauan KORAN SINDO, pasangan petahana, Ahok-Djarot, menjadi yang per-tama datang. Selang beberapa

minit setelahnya, Ahok datang. Seusai mendaftar, melalui lobiutama, Ahok-Djarot kemud-ian berfoto bersama dihadap-an wartawan. Menghadapi tes ini, keduanya mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

Ahok bahkan sempat berdirinya sejak awal telah siap mengha-dapi tes kesehatan. "Paling ha-nya puasa mulut saja," ucap Ahok singkat sebelum melaku-kan serangkaian tes.

Pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana datang kemudian. Khusus kedatangan Agus sem-pat membuat heboh sejumlah awak media. Fasalnya, diban-dingkan dengan pasangan lain-nya, termasuk Anies Baswe-dan-Sandiaga Salahudin Uno yang lebih santai, pakaian yang digunakan Agus lebih sedikit rapi. Dia mengenakan kaca mata hitam, kemeja batik me-pisah, yakni di Kantor BNN Jakarta Timur.

Tes kesehatan sesuai jadwal dilakukan pada 07.00-17.00 WIB. Penjagaan ketat oleh an-ggota TNIAD dilakukan di STer-sebut. Dari pantauan KORAN SINDO, pasangan petahana, Ahok-Djarot, menjadi yang per-tama datang. Selang beberapa

menit setelahnya, Ahok datang. Seusai mendaftar, melalui lobiutama, Ahok-Djarot kemud-ian berfoto bersama dihadap-an wartawan. Menghadapi tes ini, keduanya mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

**Gambar 3.29**  
**Contoh Berita Multi Sisi di Koran Sindo**

## 7. Hasil Analisis Berdasarkan Kategori Arah Berita

Kategori berdasarkan arah berita pada penelitian ini ialah cenderung memihak kepada salah satu calon atau tidak memihak kepada ketiga pasangan calon. Indikator dibagi menjadi cenderung memihak kepada Agus-Sylviana, cenderung memihak kepada Ahok-Djarot, cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga, dan tidak memihak kepada ketiga pasangan calon. Memihak kepada salah satu calon, merupakan salah bentuk ketidakobjektivan media dalam menyajikan berita, seharusnya media memberikan informasi yang netral tanpa memihak kepada salah satu pihak dan memojokkan pihak yang lain.

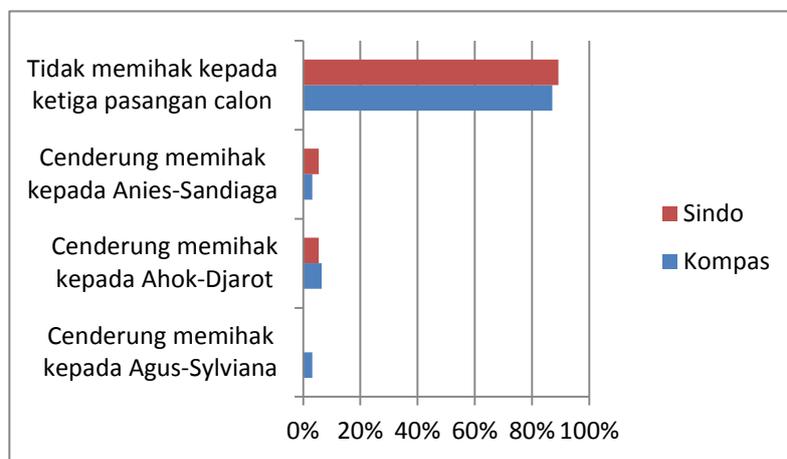
Indikator	Kompas			Sindo		
	Jumlah	Total	Persentase	Jumlah	Total	Persentase
Cenderung memihak kepada Agus-Sylviana	I	1	3,23%	-	-	-
Cenderung memihak	II	2	6,45%	II	2	5,41%

kepada Ahok-Djarot						
Cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga	I	1	3,23%	II	2	5,41%
Tidak memihak kepada ketiga pasangan calon	<del>III III</del> <del>III III</del> III II	27	87,09%	<del>III III</del> <del>III III</del> <del>III III</del> III	33	89,18%
<b>Total Keseluruhan</b>		31	100 %	<b>Total</b>	37	100%

**Tabel 3.13 Hasil Analisis Arah Berita**  
**Sumber: Data Coding 2016**

Berdasarkan hasil *coding sheet* didapatkan data berita Pilgub DKI Jakarta bulan 19 September hingga bulan 23 Oktober 2016 di Harian Kompas ditemukan berita yang cenderung memihak ke Agus-Sylviana sebesar 3,23% atau sebanyak 1 berita, cenderung memihak kepada Ahok-Djarot sebesar 6,45% atau sebanyak 2 berita, cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga sebanyak 3,23% atau sebanyak 1 berita, tidak memihak kepada ketiga pasangan calon sebesar 87,09% atau sebanyak 27 berita.

Pada Koran Sindo melalui hasil *coding sheet* didapatkan berita yang cenderung memihak kepada Ahok-Djarot ialah sebesar 5,41% atau sebanyak 2 berita, berita yang cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga sebesar 5,41% atau sebanyak 2 berita, tidak terdapat pada berita yang memihak kepada Agus-Sylviana, dan yang tidak memihak kepada ketiga pasangan calon sebesar 89,18% atau sebanyak 33 berita.



**Tabel 3.14**  
**Ilustrasi Persentase Arah Berita**

Pada gambar di atas menunjukkan persentase pemberitaan mayoritas menggunakan arah pemberitaan memihak atau netral. Persentase tidak memihak kepada ketiga pasangan calon atau netral lebih besar ditunjukkan pada persentase Koran Sindo atau sebesar 89,18%. Kedua media telah menunjukkan persentase yang besar pada kategori tidak memihak atau netral, artinya kedua media lebih banyak menunjukkan sikap yang netral terhadap kondisi Pilgub DKI Jakarta terutama dalam menyajikan informasi yang disampaikan kepada pembaca.

Dari beberapa berita Pilgub DKI baik di Koran Sindo maupun Harian Kompas ditunjukkan berita yang netral lebih unggul daripada berita yang memihak, namun baik Koran Sindo maupun Harian Kompas masih terdapat berita yang menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal tersebut dapat dilihat dari Harian Kompas yang masih menunjukkan keberpihakannya kepada Ahok-Djarot dan Agus-Sylviana yang terdapat pada tanggal 3 Oktober 2016, dengan judul berita yaitu “Modal Kampanye Andalkan Partisipasi”.

Pada berita yang berjudul “Modal Kampanye Andalkan Partisipasi” menjelaskan bahwa pihak yang diberitakan yaitu Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi oleh Kompas memihak kepada kedua calon kandidat. Seperti terdapatnya kata-kata strategi mengumpulkan modal untuk kampanye serta menjaring dukungan

massa. Strategi tersebut paling tidak sudah ditunjukkan oleh calon gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok dan Agus. Pada Ahok, strategi tersebut dilakukan dengan penjualan cinderamata dan aktivitas lainnya, seperti konser musik dan festival. Sedangkan pada Agus ialah dengan berbaur bersama warga DKI dan bertemu puluhan orang yang tergabung dalam Agus Fans Club dan Karib Agus. Selain itu, tim pemenangan nantinya terdiri atas koalisi partai pendukung Agus yaitu Demokrat, PAN, PPP, dan PKB.

Kompas juga menunjukkan keberpihakannya terhadap calon lainnya yaitu Sandiaga Uno dan Ahok. Berita pada tanggal 23 September 2016 dengan judul "Polisi Pantau Media Sosial". Berita tersebut menjelaskan bahwa bentuk keberpihakan Kompas terhadap Ahok ditunjukkan pada berita yang mengatakan bahwa pasangan Ahok-Djarot mulai menyusun visi-misi dan program yang akan ditawarkan. Program yang akan dijalankan oleh Ahok-Djarot untuk sementara ini ialah dengan meneruskan program yang telah dimulai Jokowi-Ahok, dilanjutkan dan disempurnakan seperti KJP untuk bidang pendidikan.

Selain itu, pada Sandiaga program kerja yang ia tawarkan akan fokus pada perubahan pola pikir warga Jakarta. Misalnya memanfaatkan limbah sampah menjadi barang bermanfaat dan menggalakkan kegiatan UMKM. Tujuan program tersebut ialah untuk memperluas lapangan kerja di Jakarta. Dari penjelasan tersebut, baik dari pihak Sandiaga maupun Ahok-Djarot yang hanya ditampilkan programnya, sementara pihak Agus-Sylviana tidak dimuat program yang akan dijalankan apabila terpilih menjadi cagub dan cawagub DKI Jakarta.

ring dukungan massa. Strategi ini paling tidak sudah ditunjukkan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Amalia menambahkan, pengumpulan dana masih mengandalkan penjualan cenderamata, selain kegiatan lain, seperti konser musik dan festival. Promosi dilakukan melalui situs internet yang diluncurkan ulang pada Sabtu lalu. "Kami menjaga konsep partisipasi yang selama ini dibangun Teman Ahok," ujarnya.

Agus juga bertemu puluhan orang yang tergabung dalam Agus Fans Club dan KaribAgus. Kelompok pendukung ini dibentuk swadaya dan dipastikan berperan penting selama masa pilkada. "Mereka akan bantu kenalkan saya kepada warga DKI. Target pemilih pemula dan wanita sangat rasional," kata Agus.

**Gambar 3.30**

**Contoh Berita yang berpihak kepada Agus dan Ahok di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 16)**

#### **Siapkan misi**

Selain membentuk tim pemenang, pasangan Basuki-Djarot juga mulai menyusun visi misi dan program yang akan ditawarkan. Menurut Djarot, selain kelengkapan administrasi, visi misi menjadi syarat yang harus dipenuhi terkait pencalonannya.

"Secara umum kami meneruskan program yang telah dimulai Pak Jokowi dan Pak Ahok (Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama). Kami melanjutkan dan menyempurnakannya, seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di bidang pendidikan kelak bantuan diberikan hingga tingkat perguruan tinggi," katanya.

Sementara cagub yang diajukan Partai Gerindra, Sandiaga Uno, kemarin, menuturkan, program kerja yang ia tawarkan akan fokus pada perubahan pola pikir warga Jakarta. Misalnya, memanfaatkan limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan menggalakkan kegiatan UMKM. Tujuan program itu untuk memperluas lapangan kerja di Jakarta. (HLN/MKN/WAD/C05)

**Gambar 3.31**

**Contoh Berita yang berpihak kepada Sandi dan Ahok di Harian Kompas (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Harian Kompas No. 5)**

# PDI-P Putuskan Pasangan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berencana menggelar rapat terkait Pilkada 2017 pada Selasa (20/9). Salah satu yang dibahas adalah penentuan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

"Dalam rapat akan diputuskan apakah tetap Ahok-Djarot (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) atau pasangan lain. Rapat juga merancang bagaimana mekanisme pendaftaran ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Djarot, rapat secara khusus digelar untuk membahas pilkada di beberapa daerah, khususnya yang menjadi prioritas seperti DKI Jakarta. Selain pasangan calon, rapat membahas teknis pendaftaran, apakah tanggal 21, 22, atau 23 September 2016.

"Soal apakah pakai deklarasi (pasangan calon) atau tidak, itu termasuk yang akan dibahas. Tetapi, secara pribadi, saya inginnya tidak ramai-ramai, langsung saja daftar ke KPU," ujarnya.

Terkait dengan calon pasangannya, Basuki menyatakan, belum tahu siapa pasangannya.

"(Pilkada) sekarang memang menarik, sampai sekarang bingung siapa yang daftar siapa. Belum pernah ada kejadian, kan? Sabar saja, pendaftaran 21 sampai 23 (September) nanti bakal ketahuan siapa yang mendaftar dan siapa yang tidak," tutur Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin pagi.

## Tunggu Yudhoyono

Sementara itu, pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta belum menetapkan bakal calon gubernur yang akan maju di Pilkada DKI. DPD Partai Demokrat DKI sudah menyeleksi 14 bakal calon gubernur yang mendaftar. Hasilnya tersisa delapan nama bakal calon gubernur.

Ketua Bidang Penjaringan Pilkada DPD Partai Demokrat DKI Raja Mantan Purba mengatakan, delapan bakal cagub itu di antaranya Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, dan Lulung Lunggana.

Pengurus partai itu masih menunggu keputusan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum partai. "Keputusan sekarang berada di tangan ketua umum partai. Kami pun sedang menunggu itu," katanya.

Purba menampik Pilkada DKI memiliki posisi strategis dibandingkan dengan pilkada lainnya di Indonesia sehingga pilihan bakal cagub yang diusung pun harus menunggu keputusan ketua umum partai.

"Tidak juga. Ini aturan main yang berlaku di seluruh pilkada di Indonesia, termasuk di Jakarta. Bakal cagub ditentukan ketua umum partai," kata Purba.

Purba tak bisa memberikan kepastian apakah nama cagub yang dipilih ketua umum itu berasal dari delapan nama bakal cagub yang melalui proses seleksi di DPD Demokrat DKI. Menurut dia, semua itu dapat saja berubah karena keputusan berada di ketua umum partai. "Kita tunggu saja keputusan ketua umum partai," ucapnya. (MDN/MKN/DEN)

## Gambar 3.32

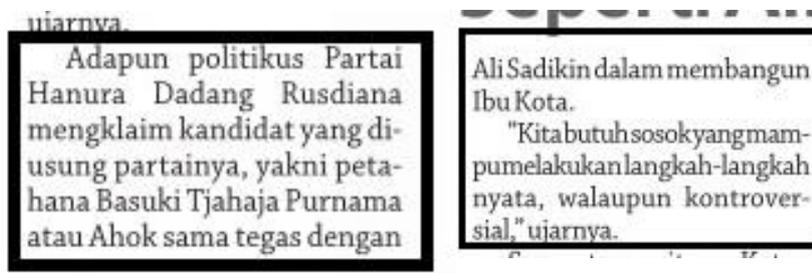
### Contoh Berita yang tidak berpihak kepada ketiga pasangan calon di Harian Kompas

Pada Koran Sindo, contoh berita yang memihak pada Ahok ialah Koran pada tanggal 30 September 2016. Berita yang berjudul "DKI Butuh Pemimpin Seperti Ali Sadikin" menjelaskan bahwa terdapat keberpihakan Sindo terhadap sosok Ahok melalui narasumber yang memberikan informasi yaitu politikus partai Hanura yang mengklaim bahwa Ahok sama tegas dengan Ali Sadikin dalam membangun Ibu Kota. Kita butuh sosok yang mampu melakukan langkah-langkah nyata, walaupun kontriversial," ujarnya. Pernyataan narasumber merupakan keberpihakan yang dibuat oleh Sindo untuk melihat sosok yang mampu menggantikan Ali Sadikin untuk memimpin Jakarta, sehingga dapat dilihat adanya

keberpihakan pada sosok yang mampu menggantikan Ali Sadikin yang juga pernah memimpin Jakarta sebelumnya ialah Ahok.

Sementara itu selain Ahok, pada Koran Sindo juga terdapat berita yang memihak kepada Anies-Sandiaga. Berita yang berjudul “HT:DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman” menjelaskan bahwa DKI Jakarta membutuhkan pemimpin yang bisa menciptakan ketentraman, mempersempit kesenjangan, dan menata kota. Harapan tersebut diyakini mampu diwujudkan oleh Anies-Sandiaga karena beliau sudah lama mengenal tokoh tersebut. Selain itu, Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo dan juga sebagai *founder* dalam media cetak Koran Sindo terlihat berpihak pada Anies dan Sandiaga dalam berita tanggal 9 Oktober 2016 tersebut. Dari berita tersebut, maka dapat dilihat keberpihakan Hary pada sosok Anies-Sandiaga.

Dari berita yang disampaikan oleh Koran Sindo mengenai Pilkada DKI Jakarta, adanya keberpihakan Hary Tanoesodibjo kepada pasangan Anis Sandi menjadi penilaian bagi peneliti terdapatnya unsur keberpihakan pemilik media massa, dalam hal ini ialah media cetak kepada salah satu pasangan calon. Meskipun untuk menunjukkan sikap netral media kepada pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada DKI Jakarta sulit, akan tetapi semestinya hal ini tetap terjaga agar dapat menunjukkan sikap media yang netral yang dapat memposisikan diri berada di tengah-tengah dan tidak berpihak kepada siapa pun, meski memiliki pasangan calon yang diunggulkan. Hal ini karena informasi yang diaampaikan oleh media cetak menjadi konsumsi publik untuk memperoleh informasi baik dalam lingkup regional maupun nasional.



Gambar 3.33

Contoh Berita yang berpihak kepada Ahok di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 13)

## HT: DKI Jakarta Butuh Pemimpin yang Bisa Ciptakan Ketentraman

**JAKARTA** – DKI Jakarta membutuhkan pemimpin yang bisa menciptakan ketentraman, mempersempit kesenjangan, dan menata kota. Dengan demikian kehidupan di Ibu Kota ke depan bisa lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo saat menerima kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno kemarin.

Tokoh yang akrab dengan sapaan

HT ini meyakini Anies-Sandiaga mampu mewujudkan harapan tersebut karena dia sudah lama mengenal kedua tokoh itu.

"Jadi kalau saya objektif, kita perlu dipimpin oleh pemimpin yang bisa memimpin dan yang bisa mengatasi ketentraman," ujar HT di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Kemarin Anies dan Sandiaga menegaskan kesiapannya untuk membenahi berbagai masalah Jakarta de-

ngan cara manusiawi. Anies misalnya menekankan bahwa pembangunan Jakarta harus dilihat dengan cara yang berbeda, yakni memajukan kota bersamaan dengan membahagiakan warganya.

Dengan demikian, memimpin Jakarta bukan seperti mengelola real estat yang hanya mengurus pembangunan kota tanpa memikirkan kesejahteraan warganya. "Kalau (pemimpin) hanya melihat kota, apa bedanya dengan pengelola real estat?"

Ke Hal 15))

Gambar 3.34

Contoh Berita yang berpihak kepada Anies-Sandiaga di Koran Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 21)



Gambar 3.35

Contoh Berita yang tidak berpihak kepada ketiga pasangan calon di Koran Sindo Sindo (berita selengkapnya dapat dilihat di lampiran berita Koran Sindo No. 19)

Pada penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil hipotesis ini terbukti karena terdapatnya perbedaan antara Harian Kompas dan Koran Sindo dalam objektivitas pemberitaan di masing-masing media cetak. Selain itu, hipotesis ini juga berkaitan dengan teori objektivitas yang terdapat dalam buku *Mass Communication Theory* yang digunakan untuk melihat objektivitas media berdasarkan kriteria objektivitas oleh Westershal yang telah diolah oleh Dennis Mc Quail. Dari beberapa kategori objektivitas yang telah diteliti, pada kategori *factualness*, berita mengenai Pilgub DKI Jakarta mengenai ketiga pasangan calon (Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, Anies-Sandi), Harian Kompas dan Koran Sindo lebih banyak menghasilkan fakta sosiologis. Namun, persentase tertinggi pada fakta sosiologis terdapat pada Harian Kompas. Sementara untuk fakta psikologis, Koran Sindo lebih banyak terdapat pada Koran Sindo dibandingkan dengan Harian Kompas, artinya Koran Sindo lebih banyak memasukkan pernyataan, penilaian dan pendapat dari wartawan yang masih memunculkan subjektivitas wartawan. Padahal berita yang baik yang dikonsumsi oleh masyarakat ialah berita yang sesuai dengan fakta atau keadaan di lapangan tanpa adanya pencampuran opini wartawan maupun dari pemilik media. Kedua media tersebut juga menunjukkan berita yang lengkap, yaitu sama-sama mementingkan pemberitaan mengenai Pilgub DKI Jakarta, meski kategori lengkap yaitu 5W+1H masih lebih tinggi terdapat pada Koran Sindo yaitu sebesar 86,48% dibanding Kompas yaitu 83,33%.

Dari sisi panjang berita, Harian Kompas dan Koran Sindo menampilkan berita yang termasuk kategori panjang, dan tidak terdapat satu pun berita yang termasuk kategori pendek, sehingga berita pada kedua media menyajikan informasi yang lengkap terhadap sebuah berita. Selain pada kategori panjang

berita, berita pada kedua media juga menunjukkan tingkat relevansi yang cukup tinggi, yang terdapat lebih dari 3 unsur berita yang disajikan. Akan tetapi, relevansi pada Koran Sindo lebih tinggi jika dibandingkan dengan Harian Kompas yaitu dengan hasil persentase Sindo sebesar 59,52% dan Kompas 52,95%. Harian Kompas dan Koran Sindo pada nilai berita, mengandung nilai berita yang termasuk pada kategori relevansi, yang mencapai 59,52% pada Koran Sindo dan Harian Kompas 52,95%. Dari sisi tipe liputan, Harian Kompas dan Koran Sindo lebih banyak menggunakan tipe liputan multi sisi dalam pemberitaannya.

Harian Kompas dan Koran Sindo telah menerapkan prinsip *balance* dengan cukup baik karena sebagian besar beritanya menggunakan tipe liputan multi sisi, yang memberikan porsi seimbang dalam pemberitaan kepada semua pihak atau aktor dengan berbagai pandangan yang berbeda. Kedua media juga menunjukkan persentase yang besar dengan tidak memihak pada ketiga pasangan calon. Meski masih menunjukkan beberapa berita yang terdapat pada kategori memihak pada salah satu atau lebih pada pasangan calon.

Hasil dari 6 indikator yang telah diteliti, menunjukkan bahwa kedua media (Harian Kompas dan Koran Sindo) telah memenuhi syarat objektivitas secara keseluruhan baik dari segi *factualness*, *completeness*, panjang berita, relevansi, tipe liputan, dan arah berita. Akan tetapi, meskipun kedua media telah memenuhi objektivitas secara keseluruhan pada media, terdapat beberapa berita yang masih menunjukkan media yang berpihak kepada salah satu paslon. Dapat dilihat dari Koran Sindo yang masih terdapat keberpihakan pemilik media, yaitu Harry Tanoesodibjo pada salah satu pasangan calon yaitu Anies-Sandi yang memberitakan Sandi dengan pemberitaan yang positif, dan terkesan menojokkan pihak lainnya. Meskipun sulit untuk tidak berpihak kepada salah satu paslon atau

tidak menunjukkan keberpihakannya, akan tetapi seharusnya media sudah menjadi penengah yang baik dengan bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakannya. Selain itu jika dilihat pada Harian Kompas, yang menunjukkan bahwa persentase terbesar menghasilkan Harian Kompas cenderung tidak memihak pada tiga paslon, namun masih terdapat beberapa berita yang menunjukkan keberpihakannya meski hanya dengan persentase yang sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya Kompas berpihak pada paslon Agus dan Ahok, serta Anies dan Ahok Djarot. Kedua media, meski menunjukkan ketidakberpihakannya pada tiga paslon tersebut, namun, terdapatnya berita yang menunjukkan keberpihakannya pada salah satu paslon menunjukkan bahwa media masih menunjukkan keberpihakannya meski hanya dengan persentase yang sangat kecil.

## 8. Tes Uji Reliabilitas

Pada bagian ini akan dilakukan uji reliabilitas berdasarkan defenisi operasional yang telah ditetapkan untuk menilai konsistensi pengukuran data dan mengetahui tingkat objektivitas peneliti dalam pengkodean. Hasil ini ditunjukkan dengan melihat hasil *coding sheet* yang telah dilakukan oleh kedua pengkoder, dan menyertakan hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap pemberitaan Pilgub DKI Jakarta periode 19 September-23 Oktober 2016. Hasil tes uji reliabilitas antar kedua coder, ialah:

Kategori	Variabel	N1	N2	M
<i>Factualness</i>	Fakta Sosiologis	19	19	19

	Fakta Psikologis	5	4	5
	Fakta Kombinasi	6	7	6
	Tidak Ada Keduanya	0	0	0
Jumlah		30	30	30

**Tabel 3.8 Hasil Tes Reliabilitas Kategori *Factualness* di Harian Kompas**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2 \cdot 30}{30+30}$$

$$CR = \frac{60}{60}$$

$$CR=1$$

$$CR=1 \times 100\%$$

$$CR=100\%$$

Tes uji reliabilitas berdasarkan kategori *factualness* di Harian Kompas bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 100%. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kesulitan bagi masing-masing coder untuk mengklarifikasi kategori *factualness* berdasarkan fakta-faktanya di komposisinya dalam sebuah surat kabar. Nilai persentase 100% menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dua coder dalam memberi penilaian terhadap *factualness* berita Pilgub DKI Jakarta 2016 di Harian Kompas. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua coder sangat signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
<i>Factualness</i>	Fakta Sosiologis	22	24	22
	Fakta Psikologis	8	7	7
	Fakta Kombinasi	6	5	6

	Tidak Ada Keduanya	0	0	0
Jumlah		36	36	35

**Tabel 3.9 Hasil Tes Reliabilitas Kategori *Factualness* di Koran Sindo**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.35}{30+30}$$

$$CR = \frac{70}{72} \quad CR=0,98 \quad CR=0,98 \times 100\% \quad CR=98\%$$

Tes uji reliabilitas berdasarkan kategori *factualness* di Koran Sindo periode bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 98%. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya kalau perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel (Eriyanto, 2011:290). Nilai persentase 98% menunjukkan hasil coding yang hampir mirip antara dua coder dalam memberi penilaian terhadap *factualness* di Koran Sindo. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua coder sangat signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
<i>Completeness</i>	Lengkap	25	25	25
	Tidak Ada Unsur What	0	0	0
	Tidak ada unsur <i>Who</i>	0	0	0
	Tidak ada unsur <i>When</i>	0	0	0

	Tidak ada unsur <i>Where</i>	0	0	0
	Tidak ada unsur <i>Why</i>	3	3	3
	Tidak ada unsur <i>How</i>	2	2	2
Jumlah		30	30	30

**Tabel 3.10 Hasil Tes Reliabilitas Kategori *Completeness* di Harian Kompas**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.30}{30+30}$$

$$CR = \frac{60}{60} \quad CR=1 \quad CR=1 \times 100\% \quad CR=100\%$$

Hasil uji reliabilitas objektivitas dalam Surat Kabar Harian Kompas pada kategori *completeness* mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa antara pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) tidak mendapatkan kesulitan yang berarti sewaktu mengkode unsur 5W+1H karena mencapai 100%. Berdasarkan data tabel di atas, maka dapat disimpulkan hasil yang ditunjukkan oleh kedua pengkode menunjukkan hasil yang signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
<i>Completeness</i>	Lengkap	32	32	32
	Tidak Ada Unsur What	0	0	0
	Tidak ada unsur <i>Who</i>	0	0	0
	Tidak ada unsur <i>When</i>	3	3	3
	Tidak ada unsur <i>Where</i>	2	2	2
	Tidak ada unsur <i>Why</i>	0	0	0

	Tidak ada unsur <i>How</i>	0	0	0
Jumlah		37	37	37

**Tabel 3.11 Hasil Tes Reliabilitas Kategori *Completeness* di Koran Sindo**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.37}{37+37}$$

$$CR = \frac{74}{74} \quad CR=1 \quad CR=1 \times 100\% \quad CR=100\%$$

Hasil uji reliabilitas objektivitas Koran Sindo pada kategori *completeness* mencapai 100%. Jumlah yang mencapai 100% pada hasil kedua coder, menunjukkan hasil yang signifikan karena kedua coder karena tidak memiliki perbedaan yang banyak pada hasil coding, sehingga keduanya menghasilkan jumlah yang sama dan mencapai hasil 100% pada hasil uji reliabilitas yang dihasilkan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Panjang Berita	Panjang	25	25	25
	Sedang	5	5	5
	Pendek	0	0	0
Jumlah		30	30	30

**Tabel 3.12 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Panjang Berita di Harian Kompas**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.30}{30+30}$$

$$CR = \frac{60}{60} \quad CR=1 \quad CR=1 \times 100\% \quad CR=100\%$$

Hasil uji reliabilitas berdasarkan kategori panjang berita yaitu mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa antara pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) tidak mendapatkan kesulitan yang berarti sewaktu mengkode panjang berita pada Harian Kompas. Berdasarkan hasil *coding sheet* yang telah diuji, berita pada Harian Kompas merupakan berita pada kategori panjang yang memiliki jumlah terbanyak yaitu sejumlah 25 berita jika dibandingkan dengan kategori sedang, dan pendek.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Panjang Berita	Panjang	29	29	29
	Sedang	7	7	7
	Pendek	0	0	0
Jumlah		36	36	36

**Tabel 3.13 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Panjang Berita di Koran Sindo**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.36}{36+36}$$

$$CR = \frac{72}{72}$$

$$CR=1$$

$$CR=1 \times 100\%$$

$$CR=100\%$$

Hasil uji reliabilitas berdasarkan kategori panjang berita pada Koran Sindo juga mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa antara pengkode 1 (N1) dan pengkode 2 (N2) tidak mendapatkan kesulitan yang berarti sewaktu mengkode panjang berita pada Koran Sindo. Berdasarkan hasil *coding sheet* yang telah diuji,

berita pada Koran Sindo merupakan berita pada kategori panjang yang memiliki jumlah terbanyak yaitu sejumlah 25 berita jika dibandingkan dengan kategori sedang, dan pendek.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Relevansi	Relevan	18	20	18
	Tidak terdapat unsur <i>timeliness</i>	0	0	0
	Tidak terdapat unsur <i>significance</i>	3	1	1
	Tidak terdapat unsur <i>magnitude</i>	6	5	6
	Tidak terdapat unsur <i>conflict</i>	7	8	7
	Tidak terdapat unsur <i>proximity</i>	0	0	0
	Tidak terdapat unsur <i>prominence</i>	0	0	0
Jumlah		34	34	32

**Tabel 3.14 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Relevansi di Harian Kompas**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.32}{34+34}$$

$$CR = \frac{64}{68} \quad CR=0,95 \quad CR=0,95 \times 100\% \quad CR=95\%$$

Tes Uji reliabilitas berdasarkan kategori relevansi pada Harian Kompas mengenai berita Pilgub DKI Jakarta bulan September hingga Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 95%. Angka 95% menunjukkan reliabel karena dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya kalau perhitungan

menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel (Eriyanto, 2011:290). Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit bagi masing-masing coder untuk mengklarifikasi berita berdasarkan relevansi berita dalam surat kabar. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua coder sangat signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Relevansi	Relevan	25	27	25
	Tidak terdapat unsur <i>timeliness</i>	2	1	1
	Tidak terdapat unsur <i>significance</i>	1	1	0
	Tidak terdapat unsur <i>magnitude</i>	9	7	7
	Tidak terdapat unsur <i>conflict</i>	5	6	5
	Tidak terdapat unsur <i>proximity</i>	0	0	0
	Tidak terdapat unsur <i>prominence</i>	0	0	0
Jumlah		42	42	38

**Tabel 3.15 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Relevansi di Koran Sindo**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.38}{42+42}$$

$$CR = \frac{76}{84} \quad CR=0,91 \quad CR=0,91 \times 100\% \quad CR=91\%$$

Tes Uji reliabilitas berdasarkan kategori relevansi pada Koran Sindo mengenai Pilgub DKI Jakarta bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 91%. Angka 91% menunjukkan

reliabel karena dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya kalau perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel (Eriyanto, 2011:290). Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit bagi masing-masing coder untuk mengklarifikasi berita berdasarkan relevansi berita dalam surat kabar. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua coder sangat signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Tipe Liputan	Satu sisi	5	5	5
	Dua sisi	6	5	5
	Multi sisi	19	20	19
Jumlah		30	30	29

**Tabel 3.16 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Tipe Liputan di Harian Kompas**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.29}{30+30}$$

$$CR = \frac{58}{60} \quad CR=0,97 \quad CR=0,97 \times 100\% \quad CR=97\%$$

Tes Uji reliabilitas berdasarkan kategori relevansi pada Harian Kompas mengenai Pilgub DKI Jakarta bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 97%. Nilai persentase 97% menunjukkan nilai yang hampir mirip antara kedua coder, yang menunjukkan tidak adanya kesulitan dalam mengcoding tipe liputan berita dari kedua coder. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit bagi masing-

masing coder untuk mengklarifikasi berita berdasarkan tipe liputan berita dalam surat kabar.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Tipe Liputan	Satu sisi	4	4	4
	Dua sisi	8	8	8
	Multi sisi	24	24	24
Jumlah		36	36	36

**Tabel 3.17 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Tipe Liputan di Koran Sindo**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.36}{36+36}$$

$$CR = \frac{72}{72} \quad CR=1 \quad CR=1 \times 100\% \quad CR=100\%$$

Tes Uji reliabilitas berdasarkan kategori tipe liputan pada Koran Sindo mengenai Pilgub DKI Jakarta bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 100%. Nilai persentase 100% menunjukkan nilai yang signifikan terhadap hasil kedua coder dalam melihat tipe liputan berita di Koran Sindo. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit bagi masing-masing coder untuk mengklarifikasi berita berdasarkan tipe liputan berita dalam surat kabar. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua coder sangat signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Arah Berita	Cenderung memihak kepada Agus-Sylviana	1	1	1

	Cenderung memihak kepada Ahok-Djarot	2	2	2
	Cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga	1	1	1
	Tidak memihak kepada ketiga pasangan calon	27	27	27
Jumlah		31	31	31

**Tabel 3.18 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Arah Berita di Harian Kompas**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.31}{31+31}$$

$$CR = \frac{62}{62} \quad CR=1 \quad CR=1 \times 100\% \quad CR=100\%$$

Tes Uji reliabilitas berdasarkan kategori arah berita pada Harian Kompas mengenai Pilgub DKI Jakarta bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 100%. Nilai persentase 100% menunjukkan nilai yang signifikan terhadap hasil kedua coder dalam melihat kategori arah berita berita di Harian Kompas. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit bagi masing-masing coder untuk mengklarifikasi berita berdasarkan arah berita dalam surat kabar. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua coder sangat signifikan.

Kategori	Variabel	N1	N2	M
Arah Berita	Cenderung memihak kepada Agus-Sylviana	0	0	0
	Cenderung memihak kepada Ahok-Djarot	2	1	1
	Cenderung memihak kepada Anies-Sandiaga	2	4	2
	Tidak memihak kepada ketiga pasangan calon	33	32	32

Jumlah	37	37	36
--------	----	----	----

**Tabel 3.19 Hasil Tes Reliabilitas Kategori Arah Berita di Koran Sindo**

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

$$CR = \frac{2.36}{37+37}$$

$$CR = \frac{72}{74} \quad CR=0,98 \quad CR=0,98 \times 100\% \quad CR=98\%$$

Tes Uji reliabilitas berdasarkan kategori arah berita pada Koran Sindo mengenai Pilgub DKI Jakarta bulan September hingga bulan Oktober 2016 menunjukkan tingkat reliabilitas penilaian antar coder 1 (N1) dan coder 2 (N2) terdapat koefisiensi reliabilitas yang mencapai 98%. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70% (Eriyanto, 2011:290). Nilai persentase 98% menunjukkan nilai yang signifikan terhadap hasil kedua coder dalam melihat kategori arah berita di Harian Kompas. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit bagi masing-masing *coder* untuk mengklarifikasi berita berdasarkan arah berita dalam surat kabar. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas antar kedua *coder* sangat signifikan.